



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Bappebti/Mjl/126/IX/2011/Edisi September

KONTRAK BERJANGKA

MENGABDI DENGAN INTEGRITAS



POKJA SRG Sinergi Antar Lembaga

**Pasar Regional Karet
Dibentuk**

BKDI Basis Bea Keluar CPO

**100% ♥
INDONESIA**

DARI REDAKSI

Indonesia saat ini pantas berbangga karena selain menjadi produsen utama CPO dunia, juga menjadi salah satu negara tujuan perdagangan berjangka CPO. Status ini menjadi lebih nyata setelah pemerintah dalam menentukan bea keluar CPO berdasarkan informasi harga yang terjadi pada transaksi CPO di Bursa Komoditi dan derivatif Indonesia (BKDI). Untuk bulan Oktober 2011, mendatang, pemerintah menetapkan bea keluar CPO dan turunannya sebesar 16,5 %.

Memang dalam menetapkan bea keluar CPO itu pemerintah tidak hanya berdasarkan harga yang tercipta di BKDI. Tetapi juga berdasarkan harga yang terjadi di bursa berjangka Malaysia dan pasar fisik CPO Rotterdam. Informasi harga dari dua pasar yang ada di luar negeri itu tetap dibutuhkan pemerintah sebagai pembanding. Tetapi jika kelak pasar CPO dunia berpindah ke Indonesia dan menjadi pelaku utama, pemerintah tidak segan-segan hanya menggunakan informasi BKDI.

Pengakuan pemerintah terhadap informasi harga yang terjadi di bursa berjangka itu tentunya menjadi angin segar bagi pelaku perdagangan berjangka komoditi. Dan terutamanya industri kelapa sawit Indonesia. Karena, informasi harga itu merupakan cerminan aktivitas para pelaku pasar komoditi.

Oleh karena itu pula, baik pemerintah maupun bursa berjangka senantiasa mengharapakan para pelaku pasar untuk lebih aktif melakukan risk management di bursa berjangka. Sehingga harga yang tercipta di bursa menjadi lebih signifikan.

Khususnya bagi petani kelapa sawit di dalam negeri, informasi harga CPO BKDI menjadi lebih relevan. Karena harga itu terjadi dari pergerakan harga yang ada di dalam negeri. Mungkin ada perbedaan harga antara Malaysia dan Rotterdam dengan BKDI, tetapi itu lebih disebabkan perbedaan sarana dan prasarana yang digunakan dari masing-masing pasar.

Tetapi yang jelas, seperti pengakuan Dirut BKDI, Me-

gain Widjaja, pergerakan harga CPO BKDI tersebut sudah sejajar dengan dua pasar lainnya.

Hal lain yang menjadi pilihan isu utama pada edisi kali ini adalah, rencana pembentukan pasar regional komoditi karet. Indonesia dan dua negara lainnya yakni, Malaysia dan Thailand, telah bersepakat untuk membentuk pasar regional komoditi karet.

Ide pembentukan pasar regional komoditi karet ini didasarkan tiga negara tersebut menguasai 70 % produksi karet dunia. Namun, dengan total produksi sebesar itu di masing-masing negara tidak memiliki pasar sebagai acuan harga

perdagangan karet. Selama ini informasi harga karet mengacu ke bursa berjangka Jepang.

Untuk tujuan pembentukan pasar regional karet itu, International Tripartite Rubber Council (ITRC) telah dua kali melakukan pembahasan. Pertemuan pertama pada bulan Juli, lalu, di Thailand, dan bulan Agustus, lalu, di Malaysia. Pertemuan selanjutnya Indonesia menjadi tuan rumah dan akan diadakan di Bali, pada Desember 2011, mendatang.

Dari pertemuan yang sudah dilakukan sebanyak dua kali itu, ada dua gagasan bentuk dari pasar regional karet. Gagasan pertama membentuk pasar berjangka komoditi karet. Dan gagasan kedua, pasar fisik komoditi karet.

Bagi Indonesia, pembentukan pasar berjangka adalah pilihan yang lebih tepat dan efisien. Karena produksi karet terbesar Indonesia sebesar 80 %, dihasilkan dari perpetanian rakyat. Sehingga jika pasar fisik komoditi karet yang akan dibentuk oleh tiga negara tersebut, dikhawatirkan petani karet Indonesia tidak mampu bersaing dengan dua negara lainnya. Karena, produsen karet di dua negara itu sudah lebih maju dan efisien dalam berproduksi.

Dari bidang sistem resi gudang (SRG), juga muncul kemajuan untuk mempercepat implementasi sistem pembiayaan pasca panen ini. Bappebti telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja SRG), yang terdiri dari berbagai instansi pemerintah dan lembaga terkait. Pokja SRG ini menjadi duta dimasing-masing instansi dan lembaga dalam mendukung kebijakan SRG. Salam! ▲



Penerbit: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Penasihat/Penanggung Jawab: Syahrul R. Sempurnajaya

Pemimpin Redaksi: Nizarli **Wakil Pemimpin Redaksi:** Natalius Nainggolan

Dewan Redaksi: Harry Prihatmoko, Diah Sandita Arisanti, Poppy Juliyanti, Subagyo, Dharmayugo Hermansyah, Sri Haryati, Rizali Wahyuni **Sirkulasi:** Sapin Siswantoro, Katimin.

Alamat Redaksi: Gedung Bappebti Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat. www.bappebti.go.id

Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan identitas serta foto ke E-mail: buletin@bappebti.go.id

DAFTAR ISI



20-21 *Komoditi*

- Piper Cubeba Oil
Herbal Asli Indonesia Rambah



26-27 *Kolom*

- SRG Skema Pembiayaan
Pertanian yang Efektif
*) Bustanul Arifin

28 *Kiprah*

Wienda Hendrawati
Futures Trading
Dunia Wanita



Info Utama.....4-5

- BKDI Basis Bea Keluar CPO
- Bea Keluar CPO Oktober Sebesar 16,5 %

Resi Gudang6-9

- POKJA SRG Sinergi Antar Lembaga
- Dukung Kebijakan SRG
- Resi Gudang Bukti Daya Serap Importir

Berjangka10-11

- Harga Bursa Adil Bagi Petani
- Pasar Karet Regional Dibentuk

Pasar Lelang12-13

- Revitalisasi PLKA Digenjot

Agenda Foto.....14-15

Aktualita16-17

- Anggota MPOA Jajaki Member BKDI
- Volatilitas Pasar Tingkatkan SPA 71,85 %
- Mari Elka Pangestu Bersepeda Santai Dengan Industri PBK & SRG
- Seminar PBK Di Tiga Kota

Analisa.....18

- Krisis Amerika-Eropa Harga Kopi Anjlok
- CPO Terseret Ke Level Terendah
- Harga Emas Berjangka Turun 101,7 Poin

Info Harga.....19

Breaknews.....22-23

- Commodity Futures Trading becomes No. 9 & Warehouse Receipt System becomes No. 10
- Trading Ministry has 3 steps to anticipate global crisis
- Indonesian Commodity & Derivative exchange is trying harder to reach 8000 lot for daily transaction
- JFX Trades Islamic Commodity

Wawasan24-25

- Lokasi Pengelola Gudang SRG
- Grafik Pialang Berjangka



THE ROLES OF COMMODITY
FUTURES INDUSTRY IN
ENHANCING QUALITY AND
SUSTAINABILITY OF ECONOMIC
DEVELOPMENT

BKDI Basis Bea Keluar CPO

Pemerintah mendorong terciptanya harga dan pasar CPO di Indonesia dengan mengakui harga bursa berjangka sebagai basis perhitungan bea keluar CPO. Sudah sewajarnya Indonesia sebagai pasar terbesar CPO dunia, karena Indonesia merupakan produsen terbesar CPO.

Indonesia saat ini memiliki pasar komoditi yang dapat dijadikan acuan harga. Selama ini, dari sekian banyak komoditi tujuan ekspor yang bea keluarnya ditetapkan pemerintah selalu mengacu pada pasar komoditi luar negeri. Semula pemerintah menetapkan bea keluar CPO berdasarkan informasi harga yang terjadi di bursa berjangka Malaysia dan pasar fisik CPO Rotterdam, Belanda. Kini pemerintah dalam menentukan bea keluar crude palm oil (CPO), telah mengambil harga dari kontrak berjangka CPO yang diperdagangkan di Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI).

Bagi pemerintah, penetapan bea keluar CPO merupakan sumber penerimaan negara yang diperoleh dari kinerja ekspor sektor industri kelapa sawit. Selain itu, strategi pemerintah menetapkan bea keluar CPO ditujukan untuk efektivitas dalam menjaga kestabilan harga minyak goreng dalam negeri, menjamin pasokan CPO untuk industri dalam negeri dan mendorong pertumbuhan industri hilir kelapa sawit.

Wakil Menteri Perdagangan, Mahendra Siregar, mengatakan, saat ini pemerintah dalam menentukan bea keluar CPO sudah mengacu pada bursa

berjangka di Jakarta. "Memang belum sepenuhnya bea keluar itu didasarkan harga yang terjadi di bursa berjangka tersebut," jelas Mahendra Siregar, saat memberi sambutan seminar perdagangan berjangka komoditi yang diselenggarakan Jakarta futures Exchange (JFX), 22 September 2011, di Jakarta.

"Strategi kita menetapkan perhitungan bea keluar CPO itu dengan cara bertahap. Semula referensi harga dalam menentukan bea keluar CPO dari sumber pasar di luar negeri yakni bursa Malaysia dan pasar fisik Rotterdam. Saat ini ditambah dari bursa berjangka dalam negeri," jelas Mahendra Siregar.

Perkembangan harga CPO dari bursa berjangka itu akan terus kita pantau, sehingga jangka menengah atau paling tidak tahun depan, kita akan evaluasi lagi apakah sudah bisa menggunakan referensi harga hanya dari dalam negeri. "Jika harga yang dari dalam negeri cukup signifikan, kita pasti akan gunakan sumber harga dari bursa berjangka itu."

"Pemerintah dalam menetapkan bea keluar CPO untuk bulan Oktober 2011, sudah mengambil referensi harga dari bursa berjangka di Jakarta itu," kata Mahendra Siregar.

Lebih jauh diutarakan Mahendra Siregar, dengan diambilnya informasi harga CPO dari bursa berjangka di Jakarta itu, baik bursa berjangka tersebut dan pelaku pasar harus diperkuat sehingga pasar tersebut mencerminkan pasar yang sesungguhnya.

Politik Pemerintah

Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Deddy Saleh, mengatakan, kebijakan itu diambil merupakan kebijakan politik pemerintah. Kalau pemerintah pun tidak mengakui lagi bursa berjangka yang ada di dalam negeri sebagai referensi harga untuk apa mereka ada?

"Pemerintah adalah pihak pertama yang harus percaya dan menggunakan prices reference yang ada dari bursa berjangka komoditi. Ini juga bagian pembinaan dari pemerintah kepada bursa berjangka tersebut," jelas Deddy Saleh.

Diutarakan Deddy Saleh, perhitungan bea keluar CPO untuk bulan Oktober 2011, sudah mengacu pada transaksi CPO dari Bursa Komoditi dan Derivatif Indone-

sia (BKDI). Saat ini kita menggunakan tiga informasi harga CPO yakni dari bursa berjangka Malaysia, pasar fisik CPO Rotterdam dan BKDI. "Setelah kita amati, harga CPO BKDI sudah sejajar dengan Malaysia, sehingga kita menambahkan BKDI."

Dengan diambilnya informasi harga CPO BKDI untuk menetapkan bea keluar CPO, hal ini pun dapat diartikan bahwa pemerintah memperhatikan industri pelaku komoditi sawit di dalam negeri. Karena, harga yang tercipta di BKDI itu juga merupakan aktifitas dari industri sawit yang ada di dalam negeri.

"Mungkin saat ini masih terbatas pelaku kelapa sawit yang bertransaksi di BKDI, tetapi harapannya dengan kebijakan pemerintah ini semakin banyak perusahaan kepala sawit yang melakukan risk manajemen di BKDI. Dan kelak Jakarta menjadi pusat pasar perdagangan CPO dunia," harapan Deddy Saleh.

Menanggapi kebijakan pemerintah tersebut, Direktur Eksekutif, Gagungan Perusahaan Kepala Sawit (Gapki), Fadli Hasan, mengatakan, menyambut baik kebijakan pemerintah tersebut. Dan, Fadli Hasan juga sepakat kalau kebijakan itu bentuk perhatian pemerintah terhadap perkembangan industri kelapa sawit di dalam negeri.

"Itu yang kita harapkan sejak dulu. Bahwa di Indonesia pun dapat diciptakan pasar CPO yang menjadi acuan perdagangan CPO dunia. Indonesia kok, yang menguasai produksi CPO saat ini, jadi pantas saja kalau harga CPO ditentukan di Indonesia," kata Fadli.

Harapan Fadli Hasan, dengan adanya kebijakan ini akan mendukung pelaku industri kelapa sawit di dalam negeri untuk lebih produktif. Petani atau siapa saja pun setiap saat dapat memantau perkembangan harga CPO dari bursa berjangka. Karena harga itu pun menggambarkan kinerja sawit di dalam negeri.

Di pihak lain, Dirut BKDI, Megain Widjaja, mengatakan, penentuan bea keluar CPO dari harga BKDI adalah bukti dan wujud nyata dukungan pemerintah Indonesia untuk menjadikan BKDI sebagai bursa yang dipercaya oleh pelaku pasar untuk bertransaksi dan melakukan lindung nilai.

"Yang kami harapkan dengan adanya kebijakan baru ini, pelaku pasar akan semakin memperhatikan harga CPO BKDI, dan akhirnya melakukan transaksi di BKDI karena akan lebih efisien dibandingkan bertransaksi di bursa Malaysia," kata Megain.

Menurut Megain, dengan diambilnya harga BKDI sebagai penentuan bea keluar CPO, BKDI akan menjaga integritas pasar dan tetap melakukan sosialisasi kepada publik dan pelaku pasar, bahwa harga BKDI sudah digunakan oleh pemerintah, de facto harga penetapan HPE. "Kami harapkan bahwa sampai akhir tahun 2011, ini, likuiditas CPOTR akan semakin tinggi dan banyak pelaku yang bertransaksi di BKDI."

Transparansi

Kepala Biro Analisis Pasar, Bappebti, Ismadjaja Toengkagie, mengatakan, sudah sewajarnya pemerintah mengambil harga CPO BKDI dalam menentukan bea keluar CPO. Karena harga yang terjadi di BKDI sudah sejajar dengan harga CPO yang diperdagangkan di bursa Malaysia dan Rotterdam. Masing-masing pasar itu memiliki perbedaan harga, tetapi memiliki tren yang sama. Antara Malaysia dan Rotterdam pun mengalami perbedaan. Hal ini disebabkan perbedaan infrastruktur yang ada di masing-masing negara.

"Di Indonesia mengapa harga CPO lebih tinggi sedikit dari dua pasar yang ada, dikarenakan infrastruktur dari masing-masing negara yang berbeda, sarana dan fasilitas pun berbeda. Akibat itu harga menjadi lebih mahal dibandingkan dengan dua pasar yang ada."

"Selain itu, harga di dua pasar itu menjadi lebih murah dikarenakan struktur para pelaku komoditi CPO di Malaysia dan Rotterdam pun sudah sangat tinggi melakukan lindung nilai. Sehingga harga menjadi lebih transparan," terang Ismadjaja.

Oleh karena itu, tambah Ismadjaja, kita pun berharap para pelaku CPO di Indonesia bisa memanfaatkan bursa berjangka dalam melakukan lindung nilai dan risk management. "Ada satu hal yang membuat para pelaku CPO di Indonesia kurang berminat memasuki bursa berjangka, yakni mereka tidak mau harga CPO Indonesia itu diketahui para petani. Dengan harapan mereka bisa menekan harga kepada para petani. Jika petani mengetahui harga dari bursa, maka para produsen besar akan kekurangan margin karena petani akan menuntut harga lebih tinggi berdasarkan informasi bursa. Tetapi sebaliknya, para pelaku itu melakukan risk management di bursa asing."

Dari sisi Bappebti, dengan adanya

kebijakan tersebut akan berupaya berkoordinasi dengan berbagai instansi terutama dengan Menko Perekonomian agar para pelaku pasar dibangkitkan, bahkan bila perlu ditekan menggunakan instrumen bursa berjangka. Sehingga terjadi transparansi harga dan efisiensi industri. Seperti halnya di China dan India, seluruh pelaku pasar diharuskan melakukan risk management di bursa berjangka.

"Bappebti berharap dengan adanya koordinasi dengan Menko Perekonomian, seluruh instansi dapat mendukung kebijakan tersebut. Misalnya, dari sisi Kementerian Keuangan, para pelaku pasar dapat diberi insentif, demikian pula dengan Kementerian Pertanian, dapat membenahi sektor hulu dari produksi komoditi," imbuh Ismadjaja Toengkagie. ▲

Bea Keluar CPO Oktober Sebesar 16,5 %

Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, kepada wartawan, 21 September 2011, di Kementerian Perdagangan, mengumumkan, bea keluar CPO dan produk turunannya mengalami penyesuaian. Untuk bulan Oktober 2011, harga referensi CPO sebesar 1.072,63 dolar Amerika per ton. Dengan demikian, bea keluar CPO sebesar 16,5 %.

Bea keluar untuk bulan Oktober 2011 mengalami kenaikan sekitar 1,5 % dibandingkan dengan bulan September 2011, yang ditetapkan 15 %.

Dalam penjelasannya, Deddy Saleh, mengatakan, penetapan tarif bea keluar CPO mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.011/2011, tertanggal 15 Agustus 2011, dan atas perubahan PMK No. 67/PMK.011/2010, tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar.

Dengan penetapan bea keluar yang terbaru itu, pemerintah menurunkan batas atas bea keluar CPO menjadi 22,5 % yang sebelumnya 25 %. Selain itu, pemerintah juga merevisi ambang batas harga referensi dari sebelumnya US\$ 700 per ton menjadi US\$ 750 per ton. Namun dikatakan deddy Saleh, interval ambang batas tetap US\$ 50 per ton. ▲



Pokja SRG Sinergi Antar Lembaga

Sinergi kebijakan antar lembaga terkait SRG sangat dibutuhkan untuk percepatan pembiayaan SRG. Dengan berbagai strategi dan kajian yang terus menerus, diyakini pembiayaan SRG menjadi sumber modernisasi sektor pertanian.

Sistem Resi Gudang (SRG) sudah diluncurkan sejak tahun 2008, hingga saat ini pelaksanaannya terus mengalami perkembangan. Pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) selaku lembaga pembina dan pengawas SRG, senantiasa berupaya meningkatkan kinerja pembiayaan pasca panen ini. Untuk mendapatkan kepercayaan dari lembaga keuangan dalam pembiayaan SRG, akan dibentuk lembaga dana jaminan resi gudang (LDJRG). Pembentukan LDJRG ini berdasarkan amanat Undang-undang No.9/2011, tentang Sistem Resi Gudang, yang perubahannya disahkan DPR RI, pada 19 Juli 2011, lalu.

Di samping itu, pemerintah mendorong keterlibatan luas dunia usaha untuk memanfaatkan instrumen pembiayaan ini. Diantaranya, diberi peluang bagi perusahaan pergudangan sebagai pengelola gudang SRG. Atau, gudang milik perusahaan pergudangan menjadi gudang SRG.

Percepatan implementasi SRG tentunya tidak terlepas dari dukungan dan

keterlibatan berbagai instansi terkait. Oleh karena itu, Bappebti menggagas dibentuknya Kelompok Kerja Sistem Resi Gudang (Pokja SRG) yang terdiri dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi dan UKM, Pengelola Gudang, surveyor, Bulog, Pusat Registrasi SRG, dan Perbankan.

Demikian antara lain diutarakan, Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya, saat memberi sambutan Pertemuan Pokja SRG, 14 September 2011, di Jakarta. Selain dihadiri Anggota Pokja SRG dari berbagai instansi terkait tersebut, pertemuan itu juga dihadiri, Guru Besar Unila, dan Peneliti Indef, Bustanul Arifin, sebagai pembahas.

"Kami sangat mengharapkan Pokja SRG ini bisa bekerja efektif, sehingga implementasi SRG semakin nyata dirasakan masyarakat terutama kalangan petani. Salah satu tujuan dibentuknya Pokja SRG ini agar ada koordinasi di tingkat instansi terkait dengan Bappebti selaku pembina dan

pengawas SRG," jelas Syahrul.

Di lapangan, tambah Syahrul, cukup banyak kita ketahui program yang relatif sama dengan mekanisme SRG dari lembaga pemerintah. Kami sangat mendukung program tersebut, tetapi ada baiknya program itu disinergikan dengan SRG yang memiliki payung hukum Undang-undang No. 9/2011.

"Yang jauh lebih buruk, program itu tidak membawa manfaat bagi petani. Malahan semakin menenggelamkan posisi petani karena selalu ketergantungan dengan bantuan pembiayaan, baik berupa kredit, bibit, pupuk maupun Alsintan- alat produksi pertanian," papar Syahrul.

"Petani memang membutuhkan bantuan semacam itu, tetapi tidak mencerdaskan mereka- petani. Dengan instrumen SRG, petani diarahkan sebagai enterpreneur, dan menghasilkan komoditi yang berkualitas SNI," tambah Syahrul.

"Jadi tujuan dibentuknya Pokja SRG ini menjadi forum komunikasi, diskusi dan koordinasi antar instansi dan lembaga terkait SRG, baik untuk memecah-

kan permasalahan yang ada maupun penyusunan langkah ke depan guna mengembangkan pelaksanaan SRG secara nasional,” tandas Syahrul R. Sempurnajaya.

Implementasi

Sementara itu, menurut Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa, Bappebti, Sutriono Edi, mengatakan, pelaksanaan SRG sudah dilakukan baik di gudang yang telah dibangun pemerintah maupun milik swasta di 19 kabupaten. Gudang tersebut sebagai penyimpanan komoditi Gabah, Beras, dan Jagung.

Selain itu, gudang di 8 kabupaten lainnya telah memperoleh persetujuan Bappebti dan siap untuk dimanfaatkan dalam SRG, meliputi Lampung, Demak, Kudus, Sragen, Ngawi, Pasuruan, Pekalongan, Bantaeng. Dalam waktu dekat akan bertambah lagi di Ciamis, Serang dan Mojokerto. Sedangkan yang masih dalam proses persetujuan dari Bappebti ada sebanyak 4 gudang SRG yang dimiliki Koperasi.

“Secara akumulatif, jumlah Resi Gudang yang telah diterbitkan hingga Agustus 2011, sebanyak 255 resi, dengan volume total komoditi sebanyak 9.311,04 ton dan total nilainya sebesar Rp 36,7 milyar,” ungkap Sutriono Edi.

Pembiayaan Resi Gudang melalui Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG) dengan bunga 6 % mulai dimanfaatkan sejak tahun 2010 oleh para kelompok tani, gapoktan dan koperasi dengan menjaminkan 139 Resi Gudang di Bank BJB, Bank Jatim, Bank BRI dan Bank Kalsel. Total pembiayaan S-SRG sebesar Rp 12 milyar atau 70 % dari total nilai Resi Gudang.

Selain itu, tambah Sutriono, S-SRG pembiayaan lain juga dilakukan oleh Lembaga Keuangan Non-Bank PKBL KBI dan LPDB dengan mengenakan bunga sebesar 6 % dan Lembaga Keuangan Bank dengan bunga komersial, dimana total pembiayaan yang telah diberikan mencapai Rp 7 milyar.

Kendala

Bustanul Arifin, yang diundang sebagai pembahas pada pertemuan Pokja SRG itu, diantaranya mengatakan, kerjasama antar instansi pemerintah dan lembaga terkait SRG sangat dibutuhkan. Agar ada benang merah kebijakan yang jelas dari berbagai lembaga.

“Pokja SRG ini seharusnya memiliki masa kerja dalam jangka waktu yang panjang. Karena tidak mudah mengedukasi masyarakat petani terhadap sebuah kebijakan yang sarat dengan kepentingan pemerintah,” jelas Guru Besar, Unila, Lampung ini.

Lalu, harus dibuat roadmap yang jelas dari masing-masing lembaga terkait, siapa melakukan apa dan apa targetnya. Dan, secara periodik dievaluasi. Sehingga, meski terjadi perubahan pejabat yang ada di instansi tersebut program percepatan implementasi SRG ini tidak terhenti.

“Kita ketahui ada banyak program pemerintah yang ditataran konsep demikian baiknya. Tetapi ketika diimplementasikan menemui banyak hambatan. Apa lagi pembiayaan SRG ini melibatkan banyak lembaga, satu simpul lembaga tidak bekerja maksimal maka kinerja SRG akan terhambat,” jelas Bustanul.

Kita ambil contoh, kata Bustanul, Kredit Usaha Tani (KUT), program pembiayaan ini sangat baik dalam membantu petani. Tetapi diketahui cukup banyak yang bolong, dana yang sudah digelontorkan tidak kembali dan cenderung memanjakan petani. Pemerintah sendiri cukup kewalahan dengan KUT ini, malah ada keinginan pemerintah untuk memutihkan KUT yang bermasalah.

“Jadi, pembenahan kelembagaan ini sangat penting. Dan disitulah kunci keberhasilan SRG. Karena, prinsipnya tujuan SRG ini ada tiga yakni jaminan harga, pemanfaatan gudang dan mekanisme pembiayaan. Tiga tujuan SRG

tidak mungkin hanya dijalankan Bappebti, harus bekerjasama dengan instansi lainnya,” katanya.

Untuk mencapai masing-masing tujuan SRG itu harus dengan strategi yang berbeda-beda pula. Kita harus realistis, implementasi SRG ini tidak mudah. “Tetapi saya cukup yakin pembiayaan SRG ini merupakan alternatif pembiayaan yang dimasa depan mampu memordenisasi sektor pertanian,” jelas Bustanul Arifin.

Sementara itu, menurut Sutriono Edi, implementasi SRG di sejumlah daerah tidak terlepas dari berbagai kendala dan permasalahan. Kendala utama yang dihadapi saat ini adalah masih kurangnya pemahaman dan komitmen masyarakat, pelaku usaha, dan perbankan terhadap mekanisme SRG. Selain itu, pemanfaatan gudang SRG yang sudah dibangun pemerintah stimulus fiskal di 34 kabupaten belum optimal. Dan, kualitas produk belum sepenuhnya memenuhi standard mutu yang diharapkan.

“Di pihak lain, sinergi antar instansi terkait, Pemda dan sektor swasta serta pelaku SRG juga belum optimal. Demikian juga dengan kebijakan antar kementerian atau lembaga belum sepenuhnya bersinergi,” tambahnya.

Lebih jauh dikatakan Sutriono Edi, untuk mengatasi kendala dan permasalahan tersebut, Bappebti melakukan upaya, pertama, sosialisasi dan edukasi antara lain pelatihan bagi para Penyuluh Pertanian Lapangan dan para Ketua Gapoktan di lokasi daerah gudang SRG. Kedua, pelatihan bagi para calon Pengelola Gudang yang diikuti oleh para pengurus koperasi maupun Pemda untuk mempersiapkan mereka menjadi Pengelola Gudang. Ketiga, Bappebti melakukan Bimbingan Teknis untuk para Tenaga Pendamping SRG di lokasi gudang SRG yang dibangun pemerintah. ▲

Volume dan Nilai Komoditi SRG

KOMODITI	PENERBITAN			DIAGUNKAN	
	Jumlah Resi Gudang	Volume Komoditi (ton)	Nilai Barang (Rp)	Jumlah Resi Gudang	Nilai (Rp)
Gabah	244	9.151,78	36.141.224.500	163	18.922.520.150
Beras	2	33	255.750.000	-	-
Jagung	9	126,25	268.138.440	4	76.200.000
TOTAL	255	9.311,04	36.665.112.940	167	18.998.720.150

Dukung Kebijakan SRG

Meningkatkan pelaksanaan SRG di masa mendatang, diperlukan sinergitas kebijakan antar lembaga dan instansi terkait. Dukungan kebijakan itu diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dengan cepat dan mengoptimalkan pemanfaatan SRG di Indonesia.

Salah satu kebijakan dari Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian, dengan Surat Edaran Ditjen P2HP, Kementan, No. 284/TU.210/G/4/2010, tentang pembelian beras ketan dalam negeri yang dilaksanakan importir. Kebijakan ini menekankan importasi ketan utuh dan beras thai hom mali dapat dilakukan bila ada kemitraan antara importir dengan Gapoktan/Penggilingan padi untuk menyerap ketan dalam negeri minimal 7,5 % dari volume impor beras ketan, dan beras wangi dalam negeri minimal 5 % dari volume permohonan impor beras thai hom mali.

Kebijakan pemerintah ini untuk mendorong importir melakukan pembelian beras ketan sebesar 7,5 % dari volume beras ketan yang akan diimpor dan pembelian beras wangi sebesar 5 % dari volume beras wangi yang akan diimpor. Hal ini menjadi suatu peluang dalam mendorong pelaksanaan SRG, dengan melakukan pemanfaatan gudang SRG sebagai tempat pembelian

para importir untuk memenuhi syarat pembelian ketan dan beras wangi dalam negeri.

Gudang SRG yang dapat dimanfaatkan untuk tempat pembelian beras ketan adalah Gudang SRG di Subang, sedangkan untuk beras wangi dapat dilakukan di Gudang SRG Cianjur. Pada April 2011, lalu, beras ketan yang disimpan di gudang Subang mencapai 800 ton, sedangkan untuk penyimpanan beras wangi di Cianjur hingga Agustus 2011, mencapai 200 ton.

Dengan memanfaatkan gudang SRG sebagai tempat pembelian, maka dapat menghilangkan faktur fiktif sebagai bukti pembelian ketan atau beras wangi oleh importir dari gapoktan seperti terjadi selama ini.

Sebagai contoh yang pernah terjadi pada tahun 2010, dimana pelaku pasar dalam negeri maupun importir sama-sama mengalami kerugian karena ternyata import beras ketan dilakukan dengan pembelian dalam negeri secara fiktif sehingga menyebabkan stok beras ketan dalam negeri menjadi berlebih dan berakibat pada jatuhnya harga beras ketan dalam negeri.

Dari sisi perbankan, dukungan yang diharapkan antara lain mempermudah dan menurunkan biaya-biaya terkait pembiayaan menggunakan Resi Gudang, memberikan pembiayaan melalui

skema SRG, melakukan sosialisasi SRG bersama Bappebti.

Sedangkan dari sisi Pengelola Gudang, diharapkan juga menjadi standby buyer. Jika komoditi yang disimpan sudah melampaui masa jatuh tempo, Pengelola Gudang bisa menjadi pembeli komoditi yang disimpan atau paling tidak menjadi mediator dengan pihak pembeli lain. Serta, ikut melakukan sosialisasi pemanfaatan SRG, mendorong petani, kelompok tani, maupun para pelaku usaha untuk memanfaatkan SRG sesuai UU No. 9/2011.

Sementara itu, dukungan kebijakan dari instansi pemerintah yang meliputi Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi dan UKM, Pengelola Gudang, surveyor, Bulog, Pusat Registrasi SRG, yakni penyusunan kebijakan untuk mendorong dan mendukung SRG, Pengoordinasian Antar Sektor Pertanian, Keuangan, Perbankan dan Sektor Terkait Lainnya, Kerjasama antar Instansi dalam penyiapan SRG mulai dari pra-panen hingga pasca panen, pengembangan standarisasi komoditas dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi, pengawasan SRG dan Penyuluhan Lapangan serta sosialisasi secara bersama-sama.

Resi Gudang Bukti Daya Serap Importir

Direktur Pemasaran Domestik, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian, (Ditjen P2HP), Mahpudin, mengatakan, Resi Gudang sebagai bukti kepemilikan komoditi pangan yang tersimpan di gudang Sistem Resi Gudang (SRG) dapat dijadikan bukti penyerapan komoditi lokal. Meski Resi Gudang dapat berpindah tangan kepada pihak lain sebelum jatuh tempo, petani sudah terbantu dalam mengatasi rendahnya harga di masa panen raya.

"Saya pikir," jelas Mahpudin.

Terkait dengan kebijakan Ditjen P2HP yang mengeluarkan berupa Surat Edaran Ditjen P2HP tahun 2007, tentang penyerapan beras ketan lokal oleh importir. Kebijakan ini kemudian disempurnakan dengan Surat Edaran Ditjen PPHP No. 284/ TU.210/G/4/2010, tentang pembelian beras ketan dalam negeri yang dilaksanakan oleh importir. Mahpudin setuju jika Resi Gudang dijadikan bukti penyerapan beras ketan oleh importir lokal.

"Caranya mungkin yang berbeda, tetapi tujuannya sama yakni petani mendapat kepastian harga dan adanya jaminan pembeli komoditi pangan," jelas Mahpudin.

Lebih jauh diutarakannya, motivasi keluarnya kebijakan itu semula dikarenakan petani ketan yang ada di wilayah Subang, tidak memiliki pasar. Pada hal, impor ketan Indonesia masih cukup tinggi. "Jadi, kebijakan itu dikeluarkan untuk mendorong petani ketan di Subang untuk berproduksi. Dan, melalui kebijakan itu kita harapkan importir dapat menjadi bapak angkat para petani untuk mendukung mereka berproduksi."

"Saya kurang yakin bukti serap importir akan beras ketan lokal difiktifkan.

Resi Gudang cukup efektif bisa dijadikan sebagai bukti penyerapan komoditi pangan lokal oleh pihak importir. Karena, terbitnya Resi Gudang itu pun datangnya dari petani atau Gapoktan,

Karena, kita ketahui kebutuhan beras ketan cukup tinggi. Mungkin itu hanya isu perang bisnis dari sesama importir. Untuk menunjukkan bukti serap itu, dinas terkait melakukan verifikasi lapangan langsung dan harus melihat fisiknya," papar Mahpudin.

Menurut Mahpudin, kebutuhan nasional akan beras ketan sekitar 200 ribu ton pertahun. Sedangkan produksi nasional hanya sekitar 60 ribu ton per tahun.

"Jadi prinsipnya, berapa saja ada stok beras ketan ditangan petani pasti akan terserap pengusaha beras," jelas Mahpudin.

Diinventarisasi

Sementara itu, Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Deddy Saleh, mengatakan, pihaknya saat ini tengah menginventarisasi kebijakan penyerapan komoditi lokal. Hal itu ditujukan untuk memperkuat dan mempercepat implementasi SRG.

"Saat ini kami sedang melihat-lihat kebijakan mana yang bisa disinergikan dengan SRG. Terutama bagi pelaku importir pangan, akan disyaratkan kepemilikan Resi Gudang dapat dijadikan bukti daya serap lokal," tegas Deddy Saleh.

Seperti halnya importir beras ketan, tambah Deddy Saleh, kebijakan dari Kementerian Pertanian sudah tepat, dan dari sisi kami pun nantinya akan ditambahkan dengan bukti kepemilikan Resi Gudang.

Tujuan keluarnya kebijakan Ditjen P2HP, yakni pertama, harga padi atau gabah ketan musim panen relatif stabil dan berada pada batas yang lebih menguntungkan dibanding dengan varietas lain. Kedua, harga beras di tingkat penggilingan padi relatif stabil baik pada musim panen maupun pasca panen. Ketiga, terjadi peningkatan mutu baik budidaya, gabah, maupun di pengolahan beras sesuai tuntutan kualitas yang diminta oleh pasar.

Keempat, terjalin kemitraan yang lebih baik antara produsen (Gapoktan) dan penggilingan padi dan pedagang beras (importir). Kelima, dengan masuknya importir (Pedagang Beras Besar) ke daerah sentra membuka peluang pemasaran beras ketan bahkan beras non-ketan menjadi makin luas bagi para penggilingan padi.

Keenam, mendorong Pemda dan petani untuk melaksanakan pemurnian benih dan mengembangkan budidaya padi ketan yang lebih baik. Ketujuh, membantu perkembangan harga yang relatif stabil dan menguntungkan baik bagi petani produsen gabah maupun penggilingan padi sebagai produsen beras. ▲



Harga Bursa Adil Bagi Petani

Meningkatnya risiko dan ketidakpastian ekonomi dunia dewasa ini, keberadaan Bursa Berjangka menjadi semakin penting khususnya untuk manajemen risiko.

Pemerintah menyadari pentingnya perdagangan komoditi dan aspek risiko yang ada dalam perdagangan tersebut. Oleh karena itu pada tahun 1999 pemerintah mendorong dan mendukung lahirnya Bursa Berjangka Jakarta. Dengan adanya Bursa Berjangka Jakarta diharapkan dapat memberi manfaat ekonomi yang besar terhadap masyarakat terutama sebagai sarana lindung nilai, sarana pembentukan harga dan alternatif investasi bagi pelaku usaha.

Dengan meningkatnya risiko dan ketidakpastian ekonomi dunia, keberadaan Bursa Berjangka menjadi semakin penting khususnya untuk manajemen risiko. Kami berharap Bursa Berjangka Jakarta, yang saat ini lebih dikenal dengan Jakarta Future Exchange (JFX), dapat terus meningkatkan transaksi perdagangan berjangka. Khususnya untuk produk-produk berbasis komoditi, baik komoditi pertanian, komoditi pertambangan maupun komoditi strategis lain sesuai payung hukum UU No. 10/2011, sebagai revisi dari UU No. 32/1997.

Demikian antara lain sambutan Wakil Menteri Perdagangan dalam seminar yang diselenggarakan JFX, 22 September 2011, di Jakarta. Seminar ini diselenggarakan JFX kerjasama dengan Ikatan sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jakarta dengan tema 'The Role of Commodity Futures in Enhancing Quality and Sustainability of Economic Development.'

"Tentunya harapan kami semua terbentuknya market yang semakin likuid di JFX. Dengan demikian, cita-cita kita

bahwa Indonesia menjadi acuan atau referensi harga komoditi dunia dapat kita dicapai dalam waktu dekat.

Dalam kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Mr. Lamon Rutten, yang saat ini menjabat sebagai Managing Director & CEO dari Multi Commodity Exchange of India (MCX), untuk kesediaannya sebagai pembicara dalam seminar ini, sekaligus untuk berbagi pengalaman mengenai peranan industri perdagangan komoditi berjangka dan keberhasilan MCX di India, kata Mahendra.

Bursa MCX menduduki peringkat atas dalam transaksi perdagangan berjangka, khususnya untuk komoditi perak, emas dan minyak mentah. Seminar hari ini merupakan kelanjutan seminar tahun lalu di Jakarta yang dilakukan oleh Mr. Lamon Rutten dalam rangka mensosialisasikan peranan penting perdagangan komoditi berjangka dalam pembangunan ekonomi.

"Kami memandang bahwa program sosialisasi dan edukasi seperti ini harus terus ditingkatkan oleh para pemangku kepentingan di industri perdagangan berjangka agar masyarakat, khususnya pelaku usaha merasakan manfaat ekonomi yang sangat besar dari perdagangan berjangka," jelas Mahendra.

Sementara itu, Lamon Rutten yang dinobatkan sebagai pembicara tunggal pada seminar tersebut, mengatakan, bursa berjangka berperan sebagai salah satu sumber informasi yang dapat menjadi acuan bagi petani komoditi. Namun, informasi harga dari bursa berjangka itu masih merupakan

informasi awal. Karena, tentunya cukup banyak aspek yang membentuk harga komoditi.

"Tetapi, informasi harga yang tercipta dari bursa berjangka merupakan informasi yang adil bagi petani dalam memprediksi perkembangan harga di masa mendatang. Dengan demikian petani dapat melakukan perencanaan akan komoditi yang dimilikinya," jelas Lamon.

Jika di masa mendatang harga komoditi petani diperkirakan rendah, dengan bursa berjangka petani bisa melakukan lindung nilai, tambah Lamon Rutten, lebih jauh. Sehingga petani tersebut terhindar dari tingkat kerugian yang lebih banyak. Demikian pula sebaliknya, ketika harga diperkirakan tinggi di masa mendatang, petani bisa menggenjot produksinya.

Sementara itu, Guru Besar Unila, Lampung, Bustanul Arifin, yang bertindak sebagai pembahas pada seminar itu mengatakan, berdirinya bursa berjangka di Indonesia tahun 2000 disaat yang kurang tepat. Karena pada tahun 1998 Indonesia masuk dalam daftar negara yang dilanda krisis ekonomi.

"Tetapi saya masih memiliki keyakinan bursa berjangka komoditi akan lebih cepat berkembang jika pasar fisik komoditi dan sistem resi gudang (SRG) dapat berkembang. Karena itu syaratnya bursa berjangka komoditi berkembang lebih maju," cecar Bustanul.

"Saya pun sepakat dengan Lamon Rutten, perkembangan bursa berjangka komoditi harus mendapat perhatian dan dukungan penuh dari pemerintah," kata Bustanul Arifin. ▲

Pasar Karet Regional Dibentuk

Indonesia, Malaysia dan Thailand sebagai negara produsen terbesar komoditi karet merencanakan membentuk pasar regional. Produksi karet dari tiga negara itu mencapai sekitar 70 %. Pembicaraan untuk membentuk pasar regional komoditi karet itu semakin mengerucut ketika pertemuan tahunan ke 19 International Tripartite Rubber Council (ITRC) di Kuala Trengganu, Malaysia, 4-9 Juli 2011, lalu. Melengkapi pembahasan rencana ITRC itu, pertemuan yang sama juga dilakukan di Bangkok, Thailand, 23-37 Agustus 2011.

Salah satu delegasi Indonesia yang menghadiri pertemuan tersebut yakni Kepala Biro Analisis Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Ismadjaja Toengkagie. Menurutnya, Bappebti sangat mendukung ide dari pembentukan pasar regional komoditi karet antara tiga negara masing-masing Indonesia, Malaysia dan Thailand. Konsep yang muncul dari dua kali pertemuan dari di dua negara itu, bahwa di masing-masing negara akan ada bursa berjangka yang memperdagangkan kontrak berjangka karet dengan spesifikasi sama dan mata uang yang digunakan dolar.

"Dengan adanya rencana ini tidak perlu didirikan bursa baru yang khusus memperdagangkan kontrak karet. Tetapi dengan menggunakan bursa berjangka yang ada di Indonesia," katanya.

Bappebti belum memutuskan bursa mana yang akan ditunjuk, karena ada banyak pertimbangan dan kajian yang harus dilakukan untuk menentukan bursa tersebut.

Terkait dengan rencana tersebut, Bappebti pun sudah memproses pengkajian dan analisis komoditi karet se-

hingga layak dijadikan kontrak berjangka.

"Dari dua kali pertemuan itu, pada dasarnya ada dua opsi yang muncul dari tengah-tengah diskusi, yakni apakah pembentukan pasar itu dengan futures market atau pasar fisik. Tetapi kecenderungan dari diskusi itu pembentukan pasar berjangka."

Delegasi Indonesia yang terlibat dipembahasan itu adalah Kementerian Pertanian, Bappebti, BPS, Gapkindo dan Kementerian Keuangan. Delegasi Indonesia itu dibawah koordinasi Ditjen Kerjasama Internasional, Kementerian Perdagangan.

"Pertimbangan kami menyetujui dibentuknya pasar berjangka karet karena lebih efisien dan efektif. Bila dibandingkan dengan mendirikan pasar fisik dibutuhkan infrastruktur gudang yang memadai. Tetapi jika melalui bursa berjangka, pembeli tinggal menentukan delivery di mana dari tiga negara tersebut," jelas Ismadjaja.

"Uniknya dari tiga negara ini adalah menjadi negara produsen terbesar di dunia tetapi tidak memiliki instrumen untuk mengendalikan harga. Malah negara lain yakni Jepang yang memiliki instrumen perdagangan berjangka komoditi karet," katanya.

Jadi inilah motivasi dari tiga negara itu untuk membentuk pasar berjangka komoditi karet, tambahnya.

"Kekhawatiran kita dari pembentukan pasar ini jika benar-benar terwujud adalah indonesia tidak mampu memenuhi spesifikasi yang ditentukan. Karena pelaku komoditi mulai dari petani hingga produsen besar masih belum efisien dan belum mampu menghasilkan karet yang berkualitas. Sampai sekarang masih terjadi upaya

curang untuk mendapatkan timbangan yang tinggi dengan memasukan benda lain didalam karet," papar Ismadjaja.

Di sisi lain, budidaya karet di Indonesia masih sangat tradisional. Hasil karet dipikul dari kebun ke tempat pengolahan. Sedangkan di Thailand dan Malaysia, kendaraan sudah bisa masuk dilorong-lorong kebun. Oleh karena itu produktivitas dari dua negara itu sangat tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Sehingga dengan efisiensi itu, para petani di dua negara tersebut bisa mengambil margin yang lebih tinggi sekitar 40 % dibandingkan dengan petani Indonesia.

Menurut Ismadjaja, resistensi dari zona perdagangan dunia tentang rencana ini belum menunjukkan reaksi dan mungkin tidak akan melakukan pemboikotan. Pembentukan tiga pasar berjangka komoditi karet di tiga negara itu tidak bisa dituduh kartel. Karena, fisiknya tidak dikuasai melainkan informasi harganya yang diperdagangkan.

Saat ini, lembaga yang mengontrol harga dan persediaan karet di tiga negara itu yakni IRCO. Jika di tiga negara tersebut tersedia instrumen perdagangan berjangka komoditi karet maka lembaga tersebut akan dibubarkan.

Petemuan pembahasan pasar bersama ini akan bergulir terus. Dan direncanakan pada bulan Desember 2011 di Bali, Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan tiga negara itu. "Nantinya saat pertemuan di Bali, Bappebti akan mempresentasikan konsep perdagangan regional perdagangan berjangka komoditi karet. Sebelumnya, Malaysia sudah mempresentasikan spesifikasi kontrak karet," tandas Ismadjaja Toengkagie. ▲



Revitalisasi PLKA Digenjot

Tahun 2012 ada sebanyak tujuh PLKA yang masuk dalam daftar direvitalisasi. Dan, 60 % dana dekonsentrasi dialokasikan untuk revitalisasi PLKA tersebut. Penyelenggara PLKA yang 'malas' akan dicoret, tahun 2012 ada tiga PLKA yang dicoret sehingga jumlah PLKA yang dibina Bappebti tersisa 16 daerah.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) selaku lembaga pembina dan pengembangan pasar lelang komoditi agro (PLKA) senantiasa melakukan evaluasi penyelenggaraan pasar lelang yang ada di sejumlah daerah. PLKA yang mulai berkembang sejak tahun 2003, ditandai dengan berdirinya PLKA Jatim dan Jabar, hingga tahun 2011 terdapat sebanyak 16 pasar lelang. Dibinanya pasar pasar lelang itu untuk menggerakkan ekonomi daerah dan pasar lelang sebagai ajang pemasaran komoditi unggulan daerah.

Pembinaan dan pengembangan pasar lelang diberbagai daerah itu sejatinya mendukung program pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian dan mengangkat komoditi unggulan daerah. Dalam perjalanannya sejak tahun 2003 hingga tahun 2010, lalu, jumlah PLKA mencapai sebanyak 18 pasar lelang. Namun untuk tahun 2011, ini, sebanyak dua pasar lelang dihentikan penyelenggaraannya masing-masing PLKA Agam, Sumbar, dan Barlingmascakab, Jateng.

Penutupan PLKA dua daerah itu oleh Bappebti dinilai kurang berkembang, baik dari volume transaksi mau-

pun rendahnya frekuensi penyelenggaraan pasar lelang. Di samping itu, komoditi yang diikuti sertakan pada penyelenggaraan pasar lelang tidak mencerminkan komoditi unggulan daerah yang bersangkutan.

Demikian antara lain diutarakan Kepala Bagian Program dan Umum, Bappebti, Sabri Usman, usai dilaksanakannya konsinyering penyusunan dana dekonsentrasi pasar lelang tahun 2012, di Bali, 10 September 2011.

"Selain penyusunan dana dekonsentrasi pasar lelang periode 2012, acara itu juga dilakukan sebagai ajang evaluasi penyelenggaraan pasar lelang di sejumlah daerah," jelas Sabri.

Berdasarkan evaluasi itu, tambah Sabri, Bappebti untuk tahun 2012 lagi-lagi menghentikan penyelenggaraan pasar lelang di tiga daerah. Masing-masing, Sumut, Bengkulu dan Kaltim. Sehingga untuk tahun 2012 hanya ada sebanyak 16 PLKA.

"Evaluasi semacam ini akan berlanjut terus. Saat ini prinsip Bappebti, tidak perlu banyak pasar lelang. kuantitasnya tidak perlu banyak, tetapi kualitasnya yang perlu ditingkatkan. Sehingga misi mendirikan pasar lelang di daerah bisa tercapai," kata Sabri.

"Makanya sejak tahun 2010, lalu, Bappebti membuka peluang bagi daerah untuk melakukan revitalisasi pasar lelang hingga tahun 2013. Saat ini sudah ada sebanyak lima daerah yang siap dan berkomitmen melakukan revitalisasi pasar lelang. Masing-masing pasar lelang Jabar, Jateng, Jatim, Bali, dan Sulsel," papar Sabri.

Tolak Ukur

Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa, Bappebti, Sutriono Edi, dalam sebuah kesempatan baru-baru ini juga mengatakan, Bappebti sudah menutup dua pasar lelang di Kabupaten Agam, dan Barlingmascakeb. "Penutupan keduanya untuk memusatkan kegiatan pasar lelang di ibukota provinsi masing-masing. Di Padang juga ada pasar lelang, sehingga yang di Kabupaten Agam ditutup. Demikian juga dengan Barlingmascakeb, sudah ada juga di pasar lelang Soropadan, Jawa Tengah. Jadi, di satu provinsi cukup satu pasar lelang saja," jelas Sutriono Edi.

Selanjutnya, tambah Sutriono, dalam upaya pembinaan terhadap para pelaku pasar lelang, Bappebti telah

melakukan program revitalisasi pasar lelang. “Dari pasar lelang yang ada itu telah dipilih lima penyelenggara pasar lelang untuk direvitalisasi. Masing-masing PLKA Jatim, Jabar, Jateng, Bali dan Sulsel. Pada Februari 2011, lalu, PLKA Jatim telah direvitalisasi. Dipilihnya lima daerah itu karena dalam praktiknya cukup berhasil mengembangkan pasar lelang sesuai konsep yang ada.”

“Tujuan revitalisasi PLKA itu untuk membentuk pasar lelang menjadi mandiri dan profesional,” papar Sutriyono Edi.

Bappebti dalam melakukan evaluasi setiap penyelenggaraan pasar lelang memiliki tolak ukur. Setidaknya, keberhasilan sebuah pasar lelang dapat ditunjukkan melalui catatan total transaksi setiap kali penyelenggaraan pasar lelang yang cukup tinggi, jumlah peserta lelang yang banyak, gagal serah rendah, komoditi yang diperdagangkan mencerminkan komoditi unggulan daerah, frekuensi penyelenggaraan pasar lelang cukup banyak dalam setiap tahun.

“Aspek lain yang saat ini menjadi sorotan Bappebti adalah adanya bentuk perhatian dari pemangku kepentingan di daerah tersebut dalam mengembangkan pasar lelang,” jelas Sabri.

Zona Merah

Dari beberapa pasar lelang yang ada, diketahui bahwa masih banyak pejabat daerah yang tidak mengetahui keberadaan pasar lelang di daerahnya. Terlebih lagi pihak legislatif daerah. Jadi bagaimana mungkin pasar lelang dapat diperjuangkan pejabat daerah untuk mendapatkan APBD, bila tidak disosialisasikan pejabat yang bersangkutan, tambah Sabri.

Evaluasi yang dilakukan Bappebti terhadap pasar lelang yang kurang mendapat dukungan dari pemangku kebijakan daerah dikategorikan dalam zona merah. Artinya, pasar lelang yang ada di daerah bersangkutan mendapat perhatian serius dari Bappebti untuk ditinjau ulang apakah masih harus dilanjutkan atau akan dihentikan penyelenggaraan pasar lelang.

Pantau Bappebti terhadap daerah yang berada di zona merah antara lain pasar lelang Riau, Jambi, Lampung, dan DKI Jakarta.

“Untuk sementara empat daerah itu berada dalam zona merah. Jika dari sisa waktu yang ada tidak menunjukkan performa lebih baik, bisa saja untuk tahun

2012 penyelenggaraan pasar lelang di daerah tersebut dihentikan. Apa lagi pemerintah daerah bersangkutan tidak menunjukkan keseriusan mengembangkan pasar lelang tersebut,” tegas Sabri.

Oleh karena itu, kata Sabri, untuk selanjutnya pengembangan dan pembinaan PLKA, Bappebti mensyaratkan dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk pembiayaan yang berasal dari APBD.

“Jumlahnya minimal 35 % dari Dana Dekonsentrasi yang diterima dari APBN. Misalnya, apabila daerah menerima Dana Dekonsentrasi senilai Rp 1 miliar, maka pemerintah daerah harus menyediakan dana minimal Rp 350 juta.”

Lebih jauh diungkapkan Sabri, untuk tahun 2012 Dana Dekonsentrasi yang berasal dari APBN untuk pembinaan dan pengembangan pasar lelang yang dialokasikan Bappebti sebesar Rp 6,250 miliar. “Sebelumnya tahun 2011, Dana Dekonsentrasi PLKA mencapai Rp 6 miliar, jadi ada kenaikan sekitar Rp 250 juta.”

“Tahun 2012, Dana Dekonsentrasi pasar lelang sekitar 60 % dialokasikan untuk lima daerah yang melakukan revitalisasi yakni PLKA Jatim, Jateng, Jabar, Sulsel dan Bali,” ungkap Sabri.

Selain itu, tambah Sabri, pada tahun 2012, ada dua daerah yang telah bertekad dan telah mengajukan proposal kepada Bappebti untuk melakukan revitalisasi pasar lelang, yakni PLKA Manado, Sulut dan DI Yogyakarta.

“Jadi, hingga tahun 2013, nanti, akan ada sebanyak tujuh daerah yang melakukan revitalisasi pasar lelang,” kata Sabri.

Transaksi Menurun

Dengan adanya tambahan dua daerah yang melakukan revitalisasi PLKA, melalui konsinyering yang diselenggarakan di Bali tersebut, ditargetkan transaksi pasar lelang pada tahun 2012 mencapai Rp 1,7 triliun. Nilai transaksi itu nantinya akan ditorehkan dari pasar lelang yang diselenggarakan sebanyak 16 daerah.

Sementara itu, dari evaluasi penyelenggaraan pasar lelang hingga Agustus 2011, diketahui nilai transaksi yang sudah dicatatkan baru mencapai Rp 700 miliar. Pada hal, semula ditargetkan total transaksi PLKA mencapai

Rp 1,6 triliun untuk tahun 2011.

Dengan sisa waktu empat bulan hingga akhir tahun 2011, tampaknya target total transaksi PLKA Rp 1,6 triliun tidak akan tercapai. Dari sebanyak 18 daerah penyelenggara pasar lelang masih ada tersisa sebanyak 11 kali penyelenggaraan pasar lelang.

Menurunnya nilai transaksi pasar lelang untuk tahun 2011 tersebut disinyalir disebabkan berbagai faktor. Diantarnya cuaca ekstri yang melanda sebagian besar daerah sentra produksi komoditi di masing-masing daerah penyelenggara pasar lelang. Di samping itu sulitnya penyelenggara pasar lelang mempertemukan pelaku pasar dari sisi pembeli dan penjual.

Kepala Bagian Pengawasan Pasar Lelang, Bappebti, Dharmayugo Hermansyah, mengatakan, penurunan nilai transaksi pasar lelang untuk tahun 2011 tersebut, sejak awal tahun sudah diduga akan terjadi.

“Pertama, penurunan transaksi pasar lelang itu disebabkan menurunnya jumlah frekuensi penyelenggaraan pasar lelang. Hal ini dikarenakan nilai Dana Dekonsentrasi tahun 2011 yang diterima masing-masing daerah penyelenggara dikurangi. Melainkan daerah yang melakukan revitalisasi nilai dana dekonsentrasinya ditingkatkan,” jelas Dharmayugo.

Sehingga, tambahnya, daerah penyelenggara kesulitan memfasilitas pertemuan antara pihak pembeli dengan penjual.

Aspek kedua yang tak kalah pelik dihadapi daerah penyelenggara pasar lelang adalah cuaca ekstrim yang terjadi di daerah tersebut. “Ada keluhan dari daerah penyelenggara pasar lelang bahwa cuaca yang kurang baik di tahun ini membuat produksi komoditi relative menurun.”

Meski hingga Agustus 2011, total transaksi PLKA baru mencapai sekitar Rp 700 miliar, Dharmayugo, cukup optimis diakhir tahun bias menembus total transaksi sebesar Rp 1,4 trlun.

“Perhitungan saya dengan sisa waktu yang ada hingga akhir tahun, total transaksi PLKA bias mencapai Rp 1,4 trlun. Memang nilai itu tidak memenuhi target. Karena semula diharapkan revitalisasi PLKA dari lima daerah bias terlaksana di tahun ini. Tetapi kenyataannya baru satu PLKA yang direvitalisasi yakni PLKA Jatim,” tandas Dharmayugo Hermansyah. ▲



Kepala Bappebti Syahrul R. Sempurnajaya, didampingi Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa, Sutriyono Edi dan Kepala Biro Perniagaan, Robert Bintaryo, membuka Pokja SRG yang keanggotaannya terdiri dari instansi pemerintah dan lembaga terkait. Guru Besar Unila, Lampung, Bustanul Arifin, menjadi pembahas pada pertemuan tersebut. Pokja SRG diharapkan sebagai motor penggerak kebijakan dimasing-masing instansi dan lembaga terkait. Jakarta 14 September 2011

Wamendag, Mahendra Siregar didampingi Kepala Biro Hukum Bappebti, Alfons Samosir, mewakili Kepala Bappebti, menerima kunjungan kerja Managing Director & CEO of Multi Commodity Exchange of India (MCX), Lamon Rutten, yang dilakukan di ruang kerja Wamendag, 21 September 2011. Sehari sebelumnya Kepala Bappebti Syahrul R. Sempurnajaya menerima Lamon Rutten, dan saling bertukar informasi mengenai perkembangan dan kendala yang dihadapi dalam perdagangan berjangka di kedua negara. Serta, dampak positif disahkannya Amandemen UUU No. 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia. Bagian akhir kunjungan Lamon Rutten di Indonesia, menjadi narasumber seminar perdagangan berjangka yang diselenggarakan Jakarta Futures Exchange. Seminar ini dibuka oleh Wamendag Mahendra Siregar. 22 September 2011.



Kepala Biro Hukum Bappebti, Alfons Samosir mewakili Kepala Bappebti membuka Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Acara ini dihadiri oleh Kepala Biro Perniagaan Bappebti, Robert J Bintaryo, Ketua BAKTI A. Zen Umar Purba, Wakil Ketua BAKTI Achmad Djauhari, Sekjen BAKTI Tri Legono Yanuarachmadi, Kepala Divisi Keuangan BBJ, Stephanus Paulus Lumintang. Acara ini diikuti Direktur Kepatuhan dari 60 Perusahaan Pialang Berjangka. Bogor, 19-20 September 2011.



Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya didampingi oleh Kepala Biro Hukum, Alfons Samosir memberikan arahan kepada para Atase Perdagangan dan ITPC yang akan ditugaskan di berbagai negara. Kepala Bappebti menghimbau agar para Atase Perdagangan dan ITPC yang akan ditugaskan dapat meningkatkan citra perdagangan Indonesia di dunia internasional dan meningkatkan diplomasi perdagangan baik kepada pemerintah setempat maupun kepada dunia usaha dalam upaya meningkatkan ekspor Indonesia. Jakarta, 23 Agustus 2011.



Sekretaris Bappebti, Nizarli memberikan kata sambutan sekaligus membuka Ujian Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka. Peserta ujian berjumlah 137 peserta, berasal dari berbagai daerah antara lain Jakarta, Pontianak, Medan, Pekanbaru, Riau dan Batam. Medan, 16-17 September 2011.

Anggota MPOA Jajaki Member BKDI

Indonesia sebagai negara produsen terbesar crude palm oil (CPO) di dunia, senantiasa diperhitungkan negara produsen lainnya. Apa lagi Indonesia saat ini memiliki bursa berjangka komoditi yang memperdagangkan kontrak berjangka CPO. Dengan status tersebut, negara jiran Malaysia yang juga produsen CPO semakin memperhitungkan Indonesia dan ingin menjajaki kerjasama regional di bidang pemasaran CPO.

Langkah itu dimulai dengan kunjungan Malaysia Palm Oil Association (MPOA) pada pertengahan bulan September 2011, lalu, ke Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI). Kunjungan MPOA ke BKDI itu dipimpin langsung Chairman MPOA, Mr. Martin Beck.

MPOA merupakan kumpulan asosiasi CPO Malaysia yang terdiri dari IOI Corporation, Genting Plantation, Sime Darby Plantation, Kuala Lumpur Kepong Plantation dan United Plantation.

Menurut Dirut BKDI, Megain Widjaja, kunjungan MPOA yang dipimpin Mr. Martin Beck, memiliki tujuan antara lain, mempelajari lebih lanjut spesifikasi kontrak CPOTR yang dianggap lebih relevan. Karena, di antara kebun kelapa sawit yang ada di Indonesia juga merupakan kebun kelapa sawit yang dimiliki masyarakat Malaysia.

"Berdasarkan itulah mereka- MPOA, ingin menjalin kerjasama yang erat dengan BKDI dan pelaku industri kelapa sawit Malaysia yang ada di Indonesia," kata Megain.

Dengan niat baik itu, tambah Megain, BKDI pun akan terbuka menjalin kerjasama. Apa lagi MPOA berjanji akan melakukan sosialisasi kontrak berjangka CPOTR pada event-event yang diselenggarakan MPOA.

"Yang membuat kita lebih bangga, beberapa anggota MPOA mengekspresikan ketertarikannya menjadi anggota BKDI. Hal itu diutarakan mereka setelah melihat langsung kontrak CPOTR dan sistem perdagangan yang digunakan BKDI," tutur Megain.

Mudah-mudahan keinginan MPOA bekerjasama dengan BKDI itu dapat diwujudkan dalam waktu yang singkat. Sehingga Indonesia benar-benar menjadi produsen dan pasar utama dunia CPO di masa mendatang, imbuh Megain Widjaja. ▲

Volatilitas Pasar Tingkatkan SPA 71,85 %

Pasar global yang kian tak menentu akhir-akhir ini berdampak pada peningkatan volume transaksi over the counter (OTC), atau yang lebih dikenal sistem perdagangan alternatif (SPA) di Jakarta Futures Exchange (JFX). Volume transaksi SPA di JFX pada bulan Agustus 2011, lalu, tercatat mencapai 1.085.676 lot. Atau mengalami peningkatan sekitar 71,85 % dibandingkan bulan Juli, yang hanya mencapai sebesar 638.623 lot.

Menurut Kepala Divisi Riset dan Pengembangan Usaha, JFX, Andam Dewi, kenaikan transaksi SPA di JFX memperlihatkan perilaku investor yang sedang memanfaatkan momentum tingginya volatilitas di pasar global.

"Akibatnya investor lebih cenderung mencari keuntungan dari volatilitas harga yang terjadi di pasar," terang Andam.

Di samping itu, tambah Andam, saat ini investor lebih nyaman bertransaksi SPA yang sudah lebih likuid dan mudah dimengerti ketimbang berinvestasi untuk kontrak-kontrak multilateral.

Namun, tambahnya, JFX optimistis hingga akhir tahun volume transaksi multilateral akan kembali naik signifikan. Hal itu didorong volume transaksi kontrak berjangka emas yang belakangan ini pergerakan harganya cukup fantastis.

"Beberapa kalangan memperkirakan harga komoditi emas akan terus

melonjak hingga penghujung tahun 2011. Dan, investor yang bertransaksi di JFX lebih percaya diri dibandingkan bertransaksi untuk kontrak berjangka lainnya," kata Andam.

Selama bulan Agustus 2011, transaksi multilateral JFX tercatat 7.175 lot. Atau mengalami kenaikan sekitar 4,62 % dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 6.858 lot.

Transaksi multilateral JFX pada bulan Agustus 2011, didominasi volume transaksi emas yang mencapai 80 % dari total volume transaksi multilateral. Transaksi para investor itu diarahkan pada Kontrak Indeks Emas (KIE), dan GOLD 250. ▲

Mari Elka Pangestu Bersepeda Santai Dengan Industri PBK & SRG

Masyarakat industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dan Sistem Resi Gudang (SRG) direncanakan menyelenggarakan Sepeda Santai- Fun Bike bersama Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu, pada 8 Oktober 2011. Kegiatan ini digagas dengan tema "Perdagangan Berjangka Komoditi dan Sistem Resi Gudang Berperan Aktif Menggerakkan Perekonomian Nasional".

Sepeda Santai ini diselenggarakan sebagai sarana silaturahmi masyarakat industri PBK dan SRG, dengan lingkungan Kementerian Perdagangan. Sepeda Santai yang diawali dari Jakarta Expo Kemayoran hingga finish ecopark Ancol, diperkirakan diikuti 3.000 peserta dari lingkungan Kemendag, Bursa Berjangka, Kliring Berjangka, Asosiasi, Perusahaan Pi-

alang Berjangka, Pedagang Berjangka, Perbankan, Pengelola Gudang, Pusat Registrasi dan masyarakat lainnya.

"Selain menjalin silaturahmi industri PBK dan SRG dengan lingkungan Kementerian Perdagangan, acara ini diselenggarakan sekaligus memperingati Ulang Tahun Bappebti yang ke 14 sebagai Unit Eselon I di Kemendag," jelas Ketua Panitia Fun Bike, Sutriyono Edi.

Menurut Sutriyono Edi yang juga Kepala Pasar Fisik dan Jasa, Bappebti, Fun Bike itu diselenggarakan dalam rangka menyambut disahkannya RUU Perubahan PBK No. 10/2011 tentang PBK dan RUU Perubahan SRG No. 9/2011, tentang SRG, oleh DPR RI pada tanggal 19 Juli 2011, lalu. Dan, telah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada 8 Agustus 2011, lalu. ▲

Jelang Lebaran Transaksi BKDI Sepi

Jelang Idul Fitri 1432 H dan sepekan pasca hari besar keagamaan itu, volume perdagangan berjangka di Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) cenderung menurun. Di sisi lain, penurunan volume transaksi itu disebabkan sebagian dari pelaku pasar fokus menghadapi hari raya idul fitri dan masa liburan.

Dirut BKDI, Megain Widjaja, mengungkapkan, penurunan transaksi pelaku pasar di BKDI terjadi karena pelaku komoditas lebih memilih fokus pada perdagangan fisik menjelang perayaan umat Islam tersebut.

"Para penjual komoditi menilai bahwa perdagangan fisik lebih menggairahkan di mana permintaan berbagai komoditas meningkat tajam untuk memenuhi kebutuhan di bulan Ramadan dan saat lebaran," jelasnya.

"Mereka tentu akan lebih memilih pada trading fisik, karena semua orang kebutuhannya sedang meningkat, bu-

tuh banyak minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya. sedangkan di pasar berjangka untuk sementara mereka acuhkan," ujar Megain.

Lebih jauh diutarakan Megain, penurunan volume transaksi di BKDI di masa liburan lebaran mencapai 50 % dari volume transaksi rata-rata harian sekitar 2.500 lot.

Di pihak lain, Direktur PT Identrust Security International (ISI) Nursalam, mengungkapkan, volume transaksi kontrak emas berjangka menurun hingga 60 % saat masa liburan lebaran.

"Lebaran hari pertama, transaksi emas BKDI menurun hanya 30 %. Meski mengalami penurunan, tetapi masih terbilang pasar cukup ramai. Karena orang menentukan apakah akan keluar dari pasar atau mempertahankan posisinya sampai lebaran selesai. Tetapi setelahnya bisa sampai 60 % turun, mungkin karena orang fokus berliburan," kata Nursalam.

Seminar PBK di Tiga Kota

Bappebti bekerjasama dengan pelaku pasar merencanakan diselenggarakan seminar perdagangan berjangka komoditi (PBK) di tiga kota besar, Medan, Bandung dan Makassar. Diselenggarakannya seminar PBK itu pasca disahkannya perubahan Undang-undang No. 32/1997, menjadi No. 10/2011, tentang perdagangan berjangka komoditi.

Hingga akhir tahun 2011, ini, seminar PBK tersebut diselenggarakan di tiga kota besar masing-masing Kota Medan, Bandung dan Makassar.

Penyelenggaraan pertama seminar PBK dilaksanakan di Kota Medan, pada 11 Oktober 2011. Pelaksanaan seminar itu atas kerjasama Bappebti dengan Bursa Komoditi dan derivatif Indonesia (BKDI).

Selanjutnya Bappebti akan bekerjasama dengan Jakarta Futures Exchange (JFX) menyelenggarakan seminar PBK di Kota Makassar dan Surabaya. ▲



Krisis Amerika-Eropa Harga Kopi Anjlok



Gejolak ekonomi yang mendera Amerika Serikat dan Eropa membuat harga kopi terjungkal cukup dalam. Para pelaku pasar meninggalkan perdagangan kopi berjangka dan mulai memilih portofolio yang lebih aman seperti komoditi emas. Dari sesi perdagangan berjangka komoditi kopi di Amerika, tampak harga kopi cukup anjlok. Untuk pengiriman bulan November 2011, harga kopi Robusta di Terminal London dan New York berada dikisaran US\$ 2.171 per ton. Pada hal, sebelumnya diperdagangkan pada level harga US\$ 2.219 per ton. Sedangkan jenis kopi Arabika yang selama ini harganya relatif stabil, juga terkena imbas, harganya turun dari US\$ 6.011 per ton menjadi US\$ 5.980 per ton untuk pengiriman November.

Sekretaris Eksekutif Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) Jawa Timur, Nur Ichwan, di Surabaya, mengatakan, para pelaku pasar melakukan aksi jual besar-besaran karena ketakutan mereka atas krisis

Amerika Serikat dan Eropa yang melanda. Jebloknya harga kopi ini juga akan berkonsekuensi pada melemahnya ekspor kopi.

Di Jawa Timur, hingga akhir tahun 2011, realisasi ekspor kopi diprediksi hanya akan mencapai 62.000 ton, turun dari realisasi tahun lalu di angka 82.000 ton. "Realisasi ekspor kopi Jatim pada tahun ini akan mengalami penurunan yang cukup besar. Di samping karena harga di akhir tahun ini anjlok, juga dipicu oleh turunnya produksi kopi Jatim," tekannya.

"Secara nasional, diperkirakan produksi kopi mengalami penurunan sekitar 30 % dari tahun 2010 yang mencapai 600.000 ton.

"Diperkirakan Indonesia mengalami penurunan produksi kopi tahun ini. Hal itu disebabkan cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun. Akibatnya, ekspor kita juga mengalami penurunan. Karena tidak ada barang, akhirnya ekspor tersendat. Bahkan, sepanjang Januari hingga Juli 2011, realisasi ekspor sekitar 36.331 ton," tegasnya. ▲

Harga Emas Berjangka Turun 101,7 Poin

Kilau harga emas agaknya mulai meredup. Di COMEX, harga emas untuk penyerahan September 2011 ditutup melemah sebesar 101,7 poin. Harga Emas berjangka ditutup pada level harga US\$ 1637,5 per troy ounce. Demikian juga di BKDI mengalami penurunan, untuk penyerahan September 2011 ditutup pada level harga Rp 482.600 per gram atau melemah sebesar Rp 24.700 per gram.

Harga Emas makin terpuruk dan mengalami penurunan di tengah kekhawatiran yang makin nyata mengenai prospek bahwa ekonomi global akan kembali mengalami resesi. Harga Emas mengalami penurunan tajam dipicu oleh anjloknya harga-harga komoditas logam lainnya.

Harga perak menjadi pimpinan penurunan dengan mengalami penurunan sebesar 5.3%. Harga logam mulia turut terseret karena para investor berpendapat bahwa permintaan logam akan melemah seiring dengan turunnya ekonomi. Diperkirakan pergerakan harga emas akan cenderung masih mengikuti progress penyelesaian krisis keuangan di Eropa. ▲

CPO Terseret Ke Level Terendah

Harga minyak sawit atau crude palm oil (CPO) anjlok ke level terendah hampir setahun terakhir. CPO tumbang karena kekhawatiran krisis utang Eropa akan melemahkan pertumbuhan global dan mengurangi permintaan komoditas.

Kontrak CPO untuk pengiriman Desember di Malaysia Derivatives Exchange (MDX) tergerus hingga 2,1% ke posisi RM 2.850 atau setara US\$ 894 per metrik ton. Ini level terendah sejak 8 Oktober tahun lalu.

Kecemasan terhadap default Yunani mengeret pasar saham global dan komodi-

tas pada kerugian kuartalan terbesar sejak 2008.

Analisis CIMB Group Holdings Bhd., Ivy Ng, menyebutkan, pemimpin Eropa tidak bisa membuat keputusan. Hal itu menyebabkan banyak kecemasan karena semakin lama menunggu, semuanya terhenti. Tidak ada yang bergerak, sehingga ekonomi bisa tertekan. "Sentimen masih sangat lemah mengikuti pasar eksternal di mana harga minyak mentah juga jatuh," ujarnya.

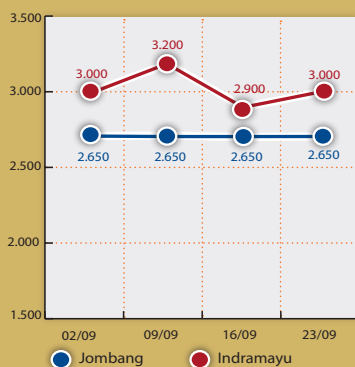
Di BKDI, harga CPOTR yang diperdagangkan juga mengalami penurunan. Harga CPO untuk penyerahan Oktober 2011 ditutup pada level harga Rp 8.945 per kilo-

gram dari harga sebelumnya Rp 9.215 per kilogram.

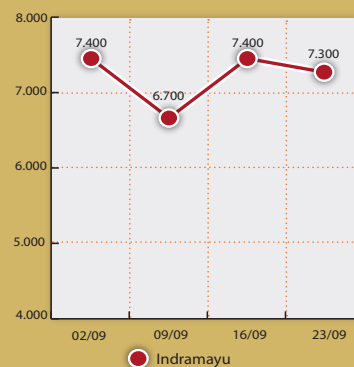
Sementara itu, hingga akhir 2011, tren positifnya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit diyakini bakal terus berlanjut. TBS diramal akan berada pada level Rp 1.800/kg. Meskipun ada bayang-bayang krisis finansial di Eropa dan Amerika Serikat tapi itu tidak akan terlalu berpengaruh terhadap tingkat permintaan ekspor CPO dari Riau. Karena tujuan pasar utama ekspor CPO Riau ke China, India dan Malaysia. ▲

Harga Komoditi (Rp/Kg)

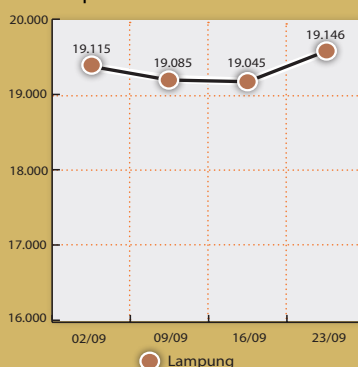
Gabah IR64



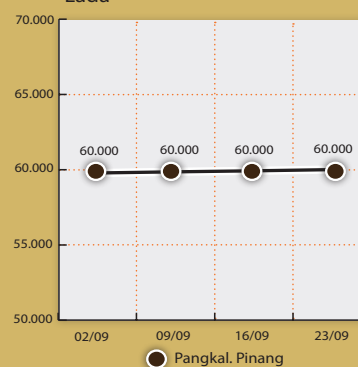
Beras IR64



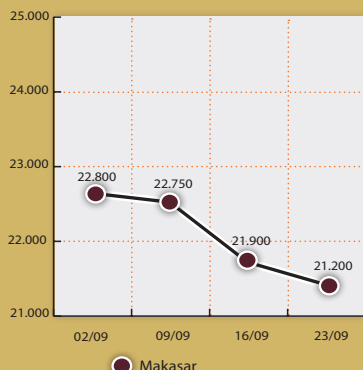
Kopi



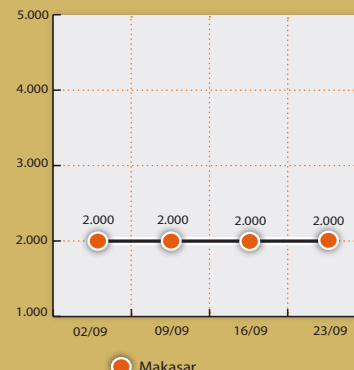
Lada



Kakao



Jagung Basah



Piper Cubeba Oil

Herbal Indonesia Rambah Dunia

Komoditi kemukus pastilah dikenal dikalangan masyarakat Jawa Tengah. Karena komoditi ini menyimpan banyak khasiat bagi kesehatan tubuh. Selain digunakan untuk berbagai bahan pengobatan alternatif, kemukus juga digunakan sebagai kalangan masyarakat untuk bumbu masakan.

Dan, kemukus merupakan salah satu komoditi yang tidak lepas dari cerita-cerita mitos ditengah-tengah masyarakat Jawa Tengah. Konon, bila masyarakat menemukan lintang kemukus, maka dalam waktu dekat akan ada peristiwa terjadinya huru-hara. Mitos itu diyakini maka terjadilah peristiwa Agresi Militer Belanda, pemberontakan PKI Madiun, maupun peristiwa G/30/S PKI.

Kemukus di pasar internasional dikenal dengan Piper Cubeba. Komoditi ini pun sudah merambah belahan bumi Eropa sejak abad ke tujuh. Hal ini seiring dengan datangnya saudagar dari Eropa ke nusantara. Maka, tak jarang juga kemukus dikenal dengan sebutan Java Pepper.

Tanaman kemukus banyak terdapat di Jawa Tengah, sebagai tanaman perkebunan rakyat. Penyebarannya terutama di wilayah Purbalingga, Purwokerto, Temanggung, dan Semarang. Demikian juga di Pulau Sumatera, kemukus tumbuh dan menyebar mulai wilayah Aceh hingga Lampung.

Berbagai kalangan industri farmasi yang menggunakan kemukus sebagai salah satu bahan bakunya, merupakan tanaman asli Indonesia. Namun, saat ini kemukus bisa di temui di India dan daratan Afrika. Oleh karena itu pula, Indonesia dan India dikenal sebagai produsen utama komoditi kemukus dunia.

Bagian utama komoditi kemukus yang memiliki nilai tinggi di pasar dunia adalah minyak atsiri kemukus. Minyak atsiri kemukus di pasar internasional bisa mencapai Rp 1 juta perkilogram. Sedangkan kemukus panen hanya berkisar Rp 50.000 perkilogram.

Buah kemukus umumnya dipanen sebelum masak kemudian dikeringkan. Kemukus sering dijual dalam bentuk buah kering yang masih memiliki tangkai, sehingga sering disebut sebagai

merica berekor (tailed pepper). Biji kemukus berwarna putih, keras dan berminyak inilah yang disuling menjadi minyak atsiri.

Buah kemukus berbiji tunggal dan rasanya khas pedas seperti lada. Maka tak jarang pula disebut kemukus sebagai lada Jawa atau cabe Jawa.

Tanaman kemukus tumbuh merambat di pohon-pohon tinggi tegak lurus dan lebih subur tumbuh di tanah berhumus gembur. Tanaman kemukus bisa merambat hingga mencapai 15 meter, dan tebal batangnya bisa mencapai 2 cm.

Batang kemukus berbuku-buku, dari tiap buku keluar daunnya yang berbentuk bulat telur, dengan ujung runcing, mirip daun sirih dan berwarna hijau gelap. Pada pangkal buku juga bisa keluar tunas cabang yang baru, atau bunga yang kelak menjadi buah. Bunga kemukus sering disebut rinu berbentuk bulir, yang biasanya "bersila" berhadapan dengan daun yang muncul pada buku daerah pucuk cabang. Buah yang akan tumbuh dari bulir itu berupa buah buni yang bertangkai.



Buah kemukus dan minyak kemukus (cubeb oil) digunakan sebagai obat-obatan dan bahan baku industri jamu tradisional. Minyak kemukus digunakan sebagai obat-obatan karena daya hangatnya yang dapat menyembuhkan penyakit radang atau infeksi.

Dengan perkembangan industri farmasi dan kosmetika, kegunaan minyak kemukus selain untuk obat-obatan juga sebagai flavouring agent dan sebagai campuran dalam formula sabun, deterjen, krim, lotion, dan parfum.

Bahkan di beberapa negara Eropa menggunakan minyak kemukus se-

bagai saos tembakau rokok. Dan konon, siapa pun yang mengisap rokok tersebut berkhasiat menyembuhkan penyakit asma atau sesak nafas.

Minyak kemukus mengandung kelompok senyawa terpen dan non terpen dimana kadar senyawa non terpen lebih rendah daripada kadar senyawa terpenya. Peningkatan nilai tambah minyak kemukus antara lain dengan cara mengurangi fraksi terpen yang terkandung di dalam minyaknya.

Senyawa terpen mudah mengalami proses oksidasi dan resinifikasi dibawah pengaruh cahaya dan udara

atau pada kondisi penyimpanan yang kurang baik, sehingga merusak bau dan flavor serta menurunkan kelarutan minyak dalam alkohol. Keuntungan yang diperoleh dari pengurangan senyawa terpen antara lain memiliki harga yang lebih tinggi, mengurangi sifat kamba, efektif dalam dosis kecil, tidak merusak rupa dari bahan pangan, dapat mempertahankan aroma, rasa dan bau, bebas dari hama penyakit serta relatif lebih stabil dalam penyimpanan untuk jangka panjang. ▲

Obat Mulut Hingga Kelamin

Dahulu, sebelum ditemukan obat anti kuman yang lebih manjur, biji kemukus banyak digunakan masyarakat sebagai obat gonorrhoea. Yakni, sejenis penyakit kelamin akibat bakteri neisseria gonorrhoea. Gejalanya, dari luka yang timbul keluar nanah, sehingga penyakit itu terkenal sebagai penyakit kencing nanah. Bakteri neisseria bisa dibasmi oleh minyak asiri yang ada pada biji kemukus.

Dalam bentuk serbuk halus, biji yang sudah digiling itulah yang digunakan untuk mengobati gonorrhoea pada kaum pria.

Karena khasiatnya yang antiseptik itu pula, biji kemukus dipakai untuk mengobati penyakit seperti sakit perut, asma, disentri, gonorrhoea, dan keputihan.

Buah kemukus dan minyak kemukus (cubeb oil) digunakan sebagai obat-obatan dan bahan baku industri jamu tradisional.

Minyak kemukus digunakan sebagai obat-obatan karena daya hangatnya yang dapat menyembuhkan penyakit radang atau infeksi.

Untuk melawan keputihan cobalah resep berikut ini: ambillah 12 butir biji kemukus, 5 buah cengkih, 2 rimpang

kunci kuning, 2 potong kayu rapat sepanjang jari tangan, 10 butir biji rumput sukmadiluwih, 1 buah kembang lawang dan 2 potong kayu mesoyi sepanjang 2,5 cm selebar 2 cm.

Semuanya dicampur dalam keadaan kering dan ditumbuk sampai halus. Sebelum dikonsumsi, serbuk hasil tumbukan itu terlebih dahulu dicampur dengan air perasan daun tapak liman 3 batang dengan akarnya, sari dua buah jeruk nipis dan segelas air. Semuanya diseduh dalam keadaan segar. Jamu mentah ini lebih berkhasiat dari pada yang sudah direbus, dan jumlah yang diperoleh cukup untuk pemakaian 3 kali.

Selain itu, kemukus pun sangat manjur mengobati penyakit bronkitis. Masyarakat Indonesia telah lama mengenal tanaman kemukus (Piper cubeba) sebagai salah satu obat tradisional pilihan. Buah kemukus merupakan salah satu bahan obat alam yang banyak digunakan sebagai pengobatan penyakit asma. Buah kemukus selain digunakan sebagai rempah juga telah digunakan pada pengobatan asma, diareha, disentri, gonorrhea, enteritis dan syphilis.

Tablet hisap adalah sediaan padat yang mengandung satu atau lebih

bahan obat, umumnya dengan bahan dasar beraroma dan manis yang dapat membuat tablet melarut atau hancur perlahan dalam mulut (Anonim, 1995). Tablet hisap umumnya ditujukan untuk pengobatan iritasi lokal atau infeksi mulut atau tenggorokan tetapi dapat juga mengandung bahan aktif yang ditujukan untuk absorpsi sistemik setelah ditelan.

Tablet hisap merupakan suatu bentuk sediaan yang biasa digunakan sebagai anestetik lokal, berbagai antisepik dan anti bakteri, demulsen, astringen, dan antitusif. Pemilihan formulasi ekstrak buah kemukus dalam bentuk tablet hisap ini sangat cocok bila diterapkan untuk pengobatan bronkitis yang memerlukan waktu relatif lama. Dengan rasa yang enak dan menyenangkan maka akan meningkatkan kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat tersebut. Selain itu dengan adanya formulasi ini dosis ekstrak yang dipakai juga bisa dikuantifikasi secara tepat sehingga efek 6 dan keamanan yang dihasilkan akan lebih baik dibandingkan jika hanya dikonsumsi secara tradisional seperti dalam bentuk jamu inilah yang dimanfaatkan sebagai jamu anti-septik. ▲

Commodity Futures Trading becomes No. 10 & Warehouse Receipt System becomes No. 9

The legalization changes of Commodity Futures Trading and Warehouse Receipt System law by House of Representative Plenary on the 19th of July 2011 has made the number for those two laws changed. Commodity Futures Trading Laws is now number 10 and Warehouse Receipt System Laws is number 9. Originally Commodity Futures Trading was number 32 year 1997 and Warehouse Receipt System was number 9 year 2006.

"About 2 weeks after those 2 laws have been agreed between government and the House of Representative, we received confirmation that Commodity Futures Trading laws is now Number

10 year 2011 and Warehouse Receipt System laws is Number 9 year 2011," Alfons Samosir, the Coftra Chief of Law Bureau.

Currently those two laws that have been changed, have been registered at Statute, Alfons added.

Furthermore Alfon said that by the legalization of those 2 laws, government has heavy and waiting assignments such as compiling government regulations, ministerial regulations, and some CoFTRA Chief decree.

To compile this government regulation, at least they will need long time, Alfon explained. But we have target that this will be accomplished in the next 6 months.

According to Alfon, the most difficult aspect in compiling government regulations on Commodity Futures Trading was the transaction of alternative trading system. The regulations have to be tightened and the sanction of laws violation needs to be aggravated. But on the other hand, the market participants for multilateral contract will be lightened.

"In our mind, the government regulation will be stimulating exchange to direct the member to do multilateral transaction. Or exchange only facilitates multilateral transaction brokers." Alfon Samosir said. ▲

Trading Ministry has 3 steps to anticipate global crisis

To anticipate the impact of economical global crisis, the trading ministry will be focused on 3 steps which are export market diversification, strengthen of Indonesian product competitiveness and strengthening domestic market. Those were some points said by Trading Minister Mari Elka Pangestu to the press at the Office of Trading Ministry in Jakarta on the 26th of September 2011.

For market diversification Mari Elka Pangestu explained various policies and programs that were developed by government are already on the same track with the development of world trading map development. Some of the policies and steps that were used for pushing the market diversification for some recent years has shown their result.

"Currently Indonesian export growth rate to emerging market country is getting bigger, exceeding the export growth to traditional markets such as Japan and USA. However, it's still important to protect those traditional markets and therefore Trading Minister has done bilateral meeting to discuss the enhancement of

trades and economic relation with EU in May 2011, and with USA and Japan in September 2011." Mari said.

Second step, the competitiveness, Mari Pangestu explained. In general Indonesian product export competitiveness currently has been getting better. It's showed from the enhancement of Indonesian share at world share that was significant enough. In 2006 Indonesian export share in global trading was about 1.2% but in 2010 it's increased to 1.7%.

"Therefore the chances are very wide to be developed, especially when we are able to enhance our product competitiveness." Mari emphasized.

The competitiveness can be seen from Indonesian export growth rate that is still high enough toward USA market and Europe and still need to be maintained. Even though USA economical condition was in crisis, Indonesian non-oil export to Uncle Sam country showed significant growth.

During the period of January - July 2011, USA export reached US\$ 9.3 billion or increased for 23.1%. The same

happened with European export that has increased 34.6% to become US\$ 12.3 billion during the same period.

In regards to domestic market strengthening, Mari Pangestu explained, this subject need to be priority considering Indonesian population reaches 245 million people. "Indonesia is a big & potential market. This has and will always be Indonesian power to face the global economic crisis. People buying power is increased along PDB growth that relatively higher in couple last years," She said.

From market safety side from unhealthy competition, there has been so many ways done, for example perfecting anti dumping/safeguard arrangement, tightening and implementation of labeling and product standard, and consumer protection. Whereas the effort to enhance quality and quality standard of domestic product will be continuously done including optimizing the 100% Love Indonesian movement since 2009. ▲

ICDX is trying harder to reach 8000 lot for daily transaction

Indonesian Commodity & Derivative Exchange is targeting 8000 lot a day for multilateral futures contract transaction until end of year 2011. The set up of 8000 lot per day is because the tendency of society or investors higher excitement to have transaction at Indonesian Commodity & Derivative Exchange. This thing was supported by the knowledge increase of people about the benefit of Commodity Futures trading. Those were some of things said by Indentrust Security International Director, Nursalam, on an event recently.

"It seems that the target of 8000 lot per day will be reached at the end of 2011. That target is quite realistic. Considering that the current investor who does transaction at Indonesian Commodity & Derivative Exchange is quite enough to experience the knowledge en-

hancement on commodity futures trading transaction," Nursalam explained.

According to him, until end of July 2011, total transaction at Indonesian Commodity & derivative exchange reached 414.137 lot or experienced enhancement about 191% from total volume of the transaction throughout 2010 for about 216.755 lot.

Moreover Nursalam explained that until this present Indonesia Commodity & Derivative Exchange has 4 commodity futures contracts, CPO-TR, GOLD-GR, GOLD-ID, and GOLD-UD. From those 4 commodity futures contracts, CPO-TR was on the first rank of Indonesian Commodity & Derivative exchange transaction total volume that reached 87.3% Then GOLD-UD was on the second place with 6.97%. On the third place was GOLD-GR with 4.99%. Next

are GOLD-ID and Foreign distribution mandate with each 0.6% and 0.04%

"Even though Foreign Distribution Mandate transaction was relatively small, but we put our concern to develop this contract domestically. It will be better if we develop that commodity futures contract domestically rather than distributing it foreign exchange," Nursalam explained.

Moreover he added that one of the benefits is that the investor value funds that were put on the transaction will not go overseas but rotate domestically. Some of Foreign distribution mandate futures contract that received attention from Indonesian Commodity & Derivative Exchange investor were soybean, coffee, sugar and petroleum. ▲

JFX Trades Islamic Commodity

National Islamic Board-Indonesian Cleric Assembly (DSN-MUI) published No. 82 fatwa in regards to Commodity Exchange based on Islamic Commodity. This fatwa is published due to Jakarta Future Exchange plans to trades Islamic commodity in the near future. The target of Islamic Commodity participants is Islamic Banking & corporation. DSN-MUI has an initiative to develop Islamic Commodity product that will be traded in JFX to overcome liquidity problem of Islamic banking.

The Chief of DSN-MUI daily executive board, K.H Ma'ruf Amin, in his explanation on fatwa's socialization event on the 8th of August 2011, said that JFX

has an obligation to make a mechanism that will enable the occurrence of trading commodity's physical handover.

More over Ma'ruf Amin said that this fatwa is not for validate the product of futures exchange, therefore do not think that MUI is justifies something that not necessarily illegitimate.

"The Futures Exchange trading is not necessarily illegitimate but there's a trade that needs to get the fatwa which is Islamic base trading," Ma'ruf explained.

According to Ma'ruf the Islamic commodity exchange should be clear, physical existence and it's forbidden to have letter trading or fictitious goods.

"If there's no physical good, it will be

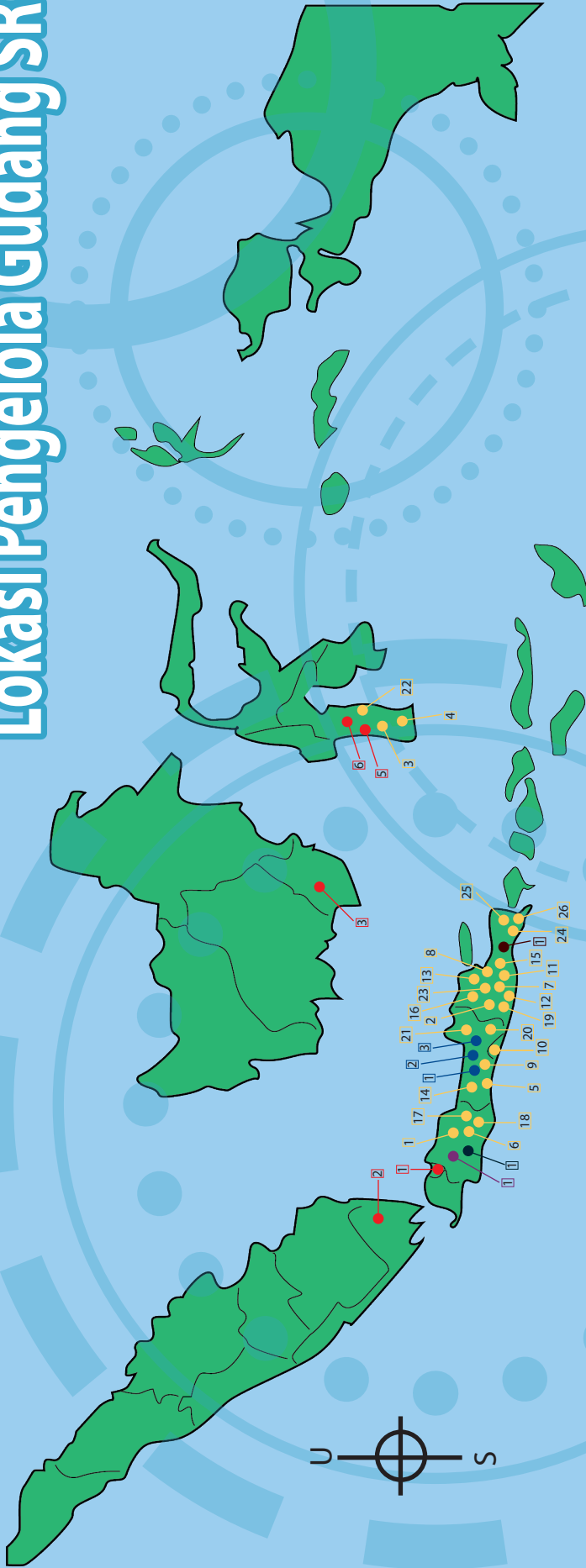
illegitimate. It happens on conventional commodity exchange." He explained.

Meanwhile, JFX Director, Bihar Sakti Wibowo, said that first step of Islamic commodity trading transaction is planned to involved coffee commodity, both Arabica and Robusta, cocoa and Crude Palm Oil (CPO).

"Except those commodities, we also notice another potential chance from mining commodity such as methanol, diesel fuel, Avtur, and coal." Bihar explained.

However Bihar explained that JFX Islamic commodity trading mechanism is still in discussion with Coftra "Hopefully it can be finished soon therefore JFX can trade Islamic commodity" ▲

Lokasi Pengelola Gudang SRG



1. PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero)

1. Gudang di Jakarta Boulevard BGR No. 1 Perintis Kemerdekaan RT. 005, RW. 002 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
2. Gudang di Bandar Lampung Jl. Ir. Suwani Km. 7, Desa Campang Raya, Kec. Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Prop. Lampung
3. Gudang di Barito Kuala Jl. Raja Handi Bakti, Desa Puntik Dalam, Kec. Mandasana, Kab. Barito Kuala, Prop. Kalimantan Selatan
4. Gudang di Gowa Jl. Seia, Kelurahan Kalase Rina, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Prop. Sulawesi
5. Gudang di Bantaeng Jl. Sasajaya, Kel. Bonto Sunggu, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng, Prop. Sulawesi Selatan

2. PT. PERTANI (Persero)

1. Gudang di Indramayu Jl. Jend. Sudirman No. 17 RT 01, RW. 02 Desa Ciparuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu - Jabar
2. Gudang di Banyuwangi Jl. Jend. Sudirman No. 4 - 6 RT 01/RW 04 Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur
3. Gudang di Pinrang Jl. Jend. Sudirman No. 5 RT VI RW II, Kel. Hecorelle Pinrang, Kec. Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan
4. Gudang di Sidrap Jl. Poros Rappang No. 08, Desa Serang, Kecamatan Mantengae, Kabupaten Sidrap, Propinsi Sulawesi Selatan
5. Gudang di Jepara Jl. Raja Jepara - Kudus Km 11 Desa Rengging Kec. Pegangaan, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah
6. Gudang di Subang Jl. Raja Bihong, Desa Bihong, Kec. Binong, Kab. Subang, Prop. Jawa Barat
7. Gudang di Mojokerto Raya Ngoro No. 96 Kel. Mojokerto, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Prop. Jawa Timur
8. Gudang di Mojokerto 2 Jl. Raya Ngoro RT 002/01 Desa Ngoro Kec. Ngoro Kab. Mojokerto Prop. Jawa Timur

9. Gudang di Kudus Jl. J. Kudus - Purwodadi Km. 15, Desa Mendini, Kec. Undaan, Kab. Kudus, Prop. Jawa Tengah
10. Gudang di Bantul Jl. Bantul Kecamatan Kasihan, sewon Kab. Bantul, DIY
11. Gudang di Probolinggo Desa Alasumur, Kec. Kraksaan, Kab. Probolinggo, Prop. Jawa Timur
12. Gudang di Mojoagung Jombang Jl. Raja Mojoagung No. 608 Desa Tanggal Rejo, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang, Prop. Jawa Timur
13. Gudang di Nganjuk Jl. Raja Surabaja - Nganjuk Km 11,4 Desa Burung Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Jawa Timur
14. Gudang di Sragen Jl. Gempolng - Karanggede, Dukuh Kwangen, Desa Nambardadas, Kec. Gempolng, Kab. Sragen, Prop. Jawa Tengah
15. Gudang di Banyuwangi Dusun Trimbelang, Desa Cluring, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi, Prop. Jawa Timur
16. Gudang di Perak Jombang Jl. Raja Jombang - Kertosono, Desa Glegahan, Kec. Perak, Kab. Jombang, Prop. Jawa Timur
17. Gudang di Cianjur Jl. Raya Cianjur - Subabumir RT 01 RW 04, Desa Jambudipa, Kec. Warungkondang, Kab. Cianjur, Prop. Jawa Barat

18. Gudang di Indramayu Losarang Jalan Komplek Perberaan Desa Munur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat
19. Gudang di Tulungagung Desa Wonorejo, Kecamatan Sumber Gembol, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur
20. Gudang di Dempet Demak Desa Dempet, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Jawa Tengah
21. Gudang di Mulyorejo Demak Jl. Raya Demak - Jepara Km 10, Desa Mulyorejo, Kecamatan Demak, Jawa Tengah
22. Gudang di Pinrang Jl. Perdidikan Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang Prov. Sulsel
23. Gudang di Madiun Jalan Raya Criban - Ngawi Desa Mungang Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun - Jawa Timur
24. Gudang di Pekalongan Jalan Singasari Nomor 9 Kojan Kabupaten Pekalongan - Jawa Tengah
25. Gudang di Pasuruan Raja Poligading Desa Poligading Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan - Jawa Timur
26. Gudang di Ngawi Desa Geringmarang Kecamatan Kedunggelar Kabupaten Ngawi - Jawa Timur

3. KOPTAN BIDARA TANI

Jalan A. Yani No. 84 RT. 01 RW. 01 Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur

4. PT. Sucofindo (Persero)

1. Gudang di Cede Bage Jl. Mekar Jaya Kav. 8 Cede Bage, Bandung - Jawa Barat

5. PT. Rek sa Guna Intersevice

1. Gudang di Cianjur Kampung Kebun Pala, Desa Sukarahadja, Kec. Cibeber Kab. Cianjur, Jawa Barat

6. PT. PETINDO DAYA MANDIRI

1. Gudang di Purwokerto Jalan Raja Jauhawing Rawalo, Desa Menganti RT. 01 RW. 03 Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
2. Gudang di Pekalongan Jl. Raja Radumuktiwara RT. 001/001 Desa Radumuktiwara Bulong Kab. Pekalongan - Jateng
3. Gudang di Karanganyar Puri Naga, Jl. Raja Solo Tawaingningu Km 9



REKAPITULASI VOLUME TRANSAKSI
KOMODITI PRIMER
PT. BURSA KOMODITI DAN DERIVATIF INDONESIA
PERIODE: 2009 S.D 2011*

NO	KONTRAK	TAHUN 2011								TOTAL
		JAN '11	PEB '11	MAR '11	APR '11	MEI '11	JUN '11	JUL '11	AGST '11	
1	GOLDGR	780	650	1,265	1,369	2,243	1,107	882	1,903	10,199
2	GOLDUD	0	0	2	10,178	21,580	6,499	5,719	8,804	52,782
3	GOLDID	0	0	0	2,198	1,002	630	418	1,251	5,499
4	CPOTR	42,734	41,249	53,366	48,967	53,006	55,099	63,061	56,212	413,694
TOTAL		43,514	41,899	54,633	62,712	77,831	63,335	70,080	68,170	482,174

*) s/d AGUSTUS 2011
Sumber: PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia

REKAPITULASI VOLUME TRANSAKSI
PALN
PT. BURSA KOMODITI DAN DERIVATIF INDONESIA
PERIODE: 2011*

NO	KONTRAK	APR '11	MEI '11	JUN '11	JUL '11	AGST '11	
1	CORN	22		14			36
2	NB COCO	26					26
3	NB SUGAR	24	4	32		43	103
4	SOYOIL	12				8	20
5	WHEAT	34	18	10	6	0	68
6	MINI WHEAT					15	15
7	MINICRUDE			24			24
TOTAL		118	22	80	6	66	292

*) s/d AGUSTUS 2011
Sumber: PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia

Rekapitulasi Transaksi Komoditi Jakarta Futures Exchange Januari - Agustus 2011

Kontrak Bulan	Jan	Feb	Maret	April	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	TOTAL
PRIMER	3,960	4,131	5,117	4,419	4,396	4,944	6,858	7,176	41,000
PALN	90	56	40	353	0	0	0	0	539
FOREX	140,429	122,583	167,805	135,596	149,054	122,999	129,841	151,577	1,119,804
INDEX	190,432	163,297	223,992	249,251	239,071	210,064	183,681	294,627	1,754,315
DCO LONDON	111,515	149,979	202,434	268,991	239,021	255,210	318,243	639,489	2,184,882
TOTAL VOLUME	446,426	440,046	599,388	658,610	631,542	593,217	638,623	1,092,869	5,100,738

Sumber : Bappebti (diolah)



SRG Skema Pembiayaan Pertanian yang Efektif



Prof. Dr. Bustanul Arifin *)
Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian UNILA
Dewan Pendiri/Ekonom Senior INDEF-Jakarta

Setelah melalui serangkaian pembahasan, diskusi panjang dan lobi-lobi melelahkan, upaya melakukan pemutihan tunggakan kredit usaha tani (KUT) nampaknya akan menjadi kenyataan. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan pemerintah akan memutihkan KUT sekitar Rp 5,7 triliun untuk membantu memperlebar akses petani kepada perbankan. Intinya, petani yang menunggak kredit akan dihapus namanya dari Sistem Informasi Debitor (SID) di Bank Indonesia, sehingga mereka berpeluang mengajukan permohonan jenis pembiayaan pertanian lainnya saat ini, seperti kredit usaha rakyat (KUR), kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE) dan sebagainya.

Banyak petani di Indonesia, utamanya petani tanaman pangan, tidak mampu memperoleh kredit baru bersubsidi dan berbunga lunak ini, karena mereka masih tercantum namanya di dalam SID Bank Indonesia. Di sisi lain, daya serap penyaluran kredit bersubsidi ini di sektor pertanian masih cukup rendah. Misalnya, lebih dari 60 % KUR disalurkan bukan kepada petani atau sektor pertanian, tetapi kepada pedagang komoditas, penyedia jasa, pengecer dan sebagainya. Bahwa petani dan sektor

pertanian memerlukan pembiayaan dari sektor perbankan dan lembaga keuangan lain tentu tidak terbantahkan. Sekian macam skema pembiayaan pertanian telah dicobakan sepanjang sejarah modern pembangunan ekonomi Indonesia, baik melalui subsidi bunga seperti kredit program, maupun melalui kredit komersial tapi terkawal secara baik.

Kisah keberhasilan Program Bimbingan Massal (Bimas), Intensifikasi Massal (Inmas), Intensifikasi Khusus (Insus) dan lain-lain dalam meningkatkan produksi dan produktivitas pangan pada era Orde Baru tentu tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan akses pembiayaan murah dan bersubsidi yang diberikan kepada petani tanaman pangan, khususnya padi. Sebagian lagi, kredit program itu juga disalurkan dalam bentuk natura dan/atau yang terpaket dengan program peningkatan produksi pangan dan pertanian umumnya. Menariknya lagi di lapangan, kredit program yang disebutkan di atas bahkan masih dapat "hidup berdampingan" dengan skema pembiayaan non-formal yang diberikan oleh peminjam uang tingkat desa (rentenir), yang tersebar di beberapa desa di Indonesia. Para pedagang pengumpul juga masih dengan leluasa memberi-

kan pinjaman modal kepada petani untuk membeli sarana produksi pertanian, seperti benih, pupuk, pestisida, sampai pada modal kerja lain.

Kredit program di sektor pertanian dengan bunga rendah ini sempat terlupakan dari hiruk-pikuk pola pembangunan yang bertumpu pada industrialisasi rapuh, yang hanya mengandalkan konglomerasi dan penguasaan aset secara tidak terkontrol, serta pola pembiayaan kepada kelompok usahanya sendiri. Prinsip-prinsip kehati-hatian perbankan (prudential banking) nyaris tidak diperhatikan, sehingga terdapat kesenjangan yang signifikan dalam pembiayaan aktivitas ekonomi riil masyarakat.

Di satu sisi, terdapat akses pembiayaan yang nyaris tidak terbatas bagi mereka yang memiliki kedekatan bisnis tertentu dengan sektor perbankan. Di sisi lain, bagi sektor ekonomi yang tidak memiliki kedekatan bisnis tertentu dengan perbankan, akses pembiayaan itu nyaris hanya berada di atas kertas. Semua paham bahwa pola yang terakhir inilah yang menjadi cikal-bakal krisis ganda di sektor keuangan dan perbankan serta krisis nilai tukar, yang akhirnya menjadi krisis ekonomi dan politik yang mewarnai pergantian rezim di Indonesia.



KUT

Pada awal era Reformasi, pemerintah mencoba menghidupkan kembali kredit program bagi sektor pertanian dengan meluncurkan Kredit Usahatani (KUT). Program perumusan KUT ini sebenarnya jauh lebih seru dan dahsyat mengingat tarik-menarik kepentingan dan afiliasi politik karena Indonesia sedang fokus pada penyelesaian perbankan, lembaga keuangan dan pemulihan perekonomian secara umum. Program KUT diberikan pemerintah pada 1998-1999 senilai Rp 7 triliun, untuk menanggulangi krisis ekonomi dan memberikan suntikan permodalan kepada sektor pertanian, yang mulai terimbas penurunan daya beli yang sangat signifikan. Benar, bahwa sektor pertanian sempat menikmati keuntungan sesaat (*windfall profit*) karena nilai jual komoditas pertanian melonjak berlipat-lipat, yang sebenarnya identik dengan anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Ketika petani pada waktu itu juga harus memenuhi kebutuhan hidupnya dengan harga-harga yang semakin menjulang, maka keuntungan sesaat itu juga menjadi petaka bagi kehidupan petani, dan perekonomian Indonesia umumnya. KUT disalurkan oleh perbankan negara (BUMN) dan swasta, baik melalui mekanisme eksekusi langsung (*executing*) maupun mekanisme penyaluran biasa (*channeling*).

Debat publik pun pada waktu itu cukup ramai, di antaranya karena ada yang menganggap bahwa KUT itu bukan merupakan produk perbankan, tapi program pemerintah yang "dititipkan" kepada sektor perbankan. Misalnya, Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyalurkan KUT dengan dana yang bersumber dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia sebesar Rp 2,8 triliun melalui skema eksekusi dan skema saluran biasa. Bank Bukopin juga menyalurkan KUT sebesar Rp 1,8 triliun, walaupun cukup banyak persentase yang menunggak (*Kompas*, 24 Agustus 2011). Total jumlah KUT yang tertunggak diperkirakan Rp 5,7 triliun (81,4 %), suatu jumlah tunggakan yang sangat besar untuk suatu program pembiayaan pertanian. Tunggakan KUT inilah yang saat ini hendak diputihkan oleh pemerintah, dengan alasan untuk memberi kesempatan kepada petani penunggak agar mampu mengajukan kredit sejenis di kemudian hari. Nama-nama petani penunggak kredit akan dikeluarkan dari SID Bank Indonesia, konon untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan ekonomi bagi petani.

Gagasan pemerintah itu tentu secara populis akan mendapat simpati karena

seakan-akan telah membantu melepaskan beban bagi petani, terutama dari kalangan miskin, yang memang tidak berdaya membayar kembali tunggakan KUT yang macet karena berbagai hambatan yang dihadapi usaha taninya. Akan tetapi, apabila benar bahwa macetnya KUT sebagian besar (65 persen) bukan disebabkan petani, tentu upaya pemutihan tunggakan KUT itu dapat menjadi preseden buruk. Pemutihan itu seakan memberikan perlindungan bagi nasabah nakal, yang biasanya bukan petani, melainkan penumpang gelap (*free rider*) yang mengambil untung dari adanya akses pembiayaan murah atau kredit program di sektor pertanian. Pemutihan itu juga seakan memberi "hukuman" bagi petani yang rajin membayar angsuran utangnya, karena dipersamakan dengan mereka yang sengaja nakal tidak berniat membayar cicilan itu.

Perjalanan program KUT memang penuh liku dan beragam cerita, karena melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat madani, termasuk tidak kurang dari 27.000 koperasi unit desa (KUD) dengan berbagai tingkat kemajuan dan sofistikasi organisasi dan kelembagaannya. Sebagaimana kredit program lainnya, sistem administrasi dan birokrasi dari KUT jelas tidak sederhana, walaupun dengan pertimbangan untuk memperbaiki kinerja pengawasan, monitoring dan evaluasi program itu sendiri. Justru dari kerumitan administrasi dan birokrasi inilah yang membuat program pembiayaan KUT menemui banyak kesulitan, termasuk sekian kasus penyaluran dana bukan kepada petani, tapi juga ke usaha non-pertanian. Akumulasi sekian macam persoalan dan keraguan sektor perbankan untuk menganggap bahwa KUT itu adalah produk perbankan telah berkontribusi pada tunggakan kredit yang menumpuk sampai akhirnya menjadi kredit macet yang mencapai Rp 5,7 triliun tersebut.

Dari pelajaran dan drama perjalanan KUT sejak awal era Reformasi, merumuskan dan melaksanakan pembiayaan sektor pertanian memang tidak mudah, karena selain persoalan kelembagaan, biaya transaksi yang ditimbulkannya, dan kemungkinan moral hazards dan penyalahgunaan wewenang yang cukup besar. Secara psikologis, apabila sampai tertanam persepsi di kalangan debitur petani (dan non-petani) bahwa kredit sektor pertanian kelak akan diputihkan, maka sangat sulit bagi siapa pun yang akan merancang dan merumuskan kebijakan pembiayaan sektor pertanian. Akibat berikutnya adalah bahwa target peningkatan produksi dan produktivitas pertanian sulit akan tercapai, sehingga upaya peningkatan kesejahteraan petani pun akan terkendala.

SRG

Oleh karena itu, beberapa jalan keluar berikut mungkin bermanfaat dalam merumuskan skema pembiayaan pertanian yang efektif ke depan. Pertama, perbaikan komunikasi sektor perbankan (dan lembaga keuangan lain) dengan sektor pertanian. Hal ini untuk menanggulangi *missunderstanding* atau kesaling-tidak pahaman di antara kedua sektor, karena buruknya komunikasi dan informasi yang diperoleh masing-masing sektor. Dengan perbaikan komunikasi dan pengemasan informasi yang lebih bersahabat, maka diharapkan bahwa perbankan tidak lagi menganggap pertanian sebagai sektor kumuh, miskin, berisiko tinggi dan sebagainya. Demikian pula, pertanian tidak lagi menganggap perbankan sebagai sektor elit, tidak mau tahu karakter petani, usahatani dan sektor pertanian secara umum.

Kedua, perbaikan produk perbankan yang lebih inovatif dalam membiayai sektor pertanian, sehingga tidak sepenuhnya mengandalkan kredit program yang sering bermasalah seperti diuraikan sebelumnya. Misalnya perbankan dapat mengembangkan skema pembiayaan ke depan (*forward financing*), dengan tingkat bunga komersial biasa. Bahkan perbankan perlu lebih berani merangkul Sistem Resi Gudang (SRG) yang saat ini hanya dinakhodai oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). SRG ini kelak akan lebih kompatibel dengan bursa berjangka komoditas (*futures trading*), yang menjadi ciri khas negara-negara industri maju.

Ketiga, penyempurnaan skema perlindungan di sektor pertanian, termasuk pemberdayaan petani untuk menanggulangi hambatan permodalan yang dihadapi. Misalnya, wacana pengembangan asuransi tanaman (*crop insurance*) perlu dihidupkan kembali agar menjadi lebih operasional di lapangan. Asuransi tanaman ini akan sangat bermanfaat mengatasi risiko gangguan cuaca dan perubahan iklim, wabah hama dan penyakit, kegagalan panen dan lain-lain. ▲



Futures Trading Dunia Wanita

Wienda Hendrawati

Meski tidak memiliki banyak pengalaman di bidang perdagangan berjangka komoditi, Wienda Hendrawati, cukup piawai memimpin PT. Trust Artha Futures (TAF). Sejak Mei 2010, Wienda, begitu dia disapa, tercatat sebagai Direktur Utama di perusahaan pialang berjangka anggota Jakarta Futures Exchange (JFX) itu.

"Saya sungguh menikmati bisnis ini. Karena di sini cukup banyak tantangan yang dihadapi. Dan, setiap menjawab tantangan itu, diperlukan jiwa seni. Mungkin jiwa seni itulah yang membuat saya happy di bisnis ini," jelas Wienda.

Selain itu, ya, tambahanya, saya pikir bisnis ini harusnya banyak diisi oleh kaum wanita. Alasannya, wanita itu lebih taff, dan dalam kesehariannya selalu mengikuti tren atau model.

"Nah, bisnis ini kan hanya berkutat mengikuti atau membaca tren dan perkembangan pasar lainnya. Jadi seharusnya wanita-lah lebih banyak mengisi industri ini," akunya.

Menurut Wienda, TAF sudah berdiri sejak tahun 2005, di mana saat itu booming berdirinya perusahaan pialang berjangka pasca keluarnya kebijakan otoritas perdagangan berjangka yang mengizinkan perdagangan di luar bursa.

Tetapi setelah izin dikantongi, ada kebijakan baru bahwa TAF harus cemplung lebih dulu selama dua tahun di perdagangan multilateral. "Karena basic pendiri TAF tidak ada di bidang perdagangan komoditi primer, akhirnya perusahaan ini vacum. Pada hal saya sudah terlanjur setor sejumlah dana untuk operasional dari sejak awal pengurusan izin hingga persiapan membuka kantor. Akhirnya uang itu tak berbekas," tutur Wienda.

Jadi sejak tahun 2006 hingga awal 2010, TAF tidak beroperasi. Tetapi Tuhan senantiasa memberi jalan untuk saya meneruskan misi berdirinya perusahaan

ini. Suatu ketika diawal tahun 2010, saya mendapat surat dari Bappebti, yang intinya menanyakan status TAF. Apakah izinnya dicabut atau masih ada maksud untuk beroperasi. Berdasarkan surat itu, saya bangkit dan menghubungi sejumlah rekan untuk mendapatkan dukungan modal mengoperasionalkan TAF. "Dalam waktu singkat upaya itu berhasil, dan TAF beroperasi sejak Mei 2010," kisah Wienda.

"Jadi kalau boleh dibilang TAF masih sangat baru di industri ini. Tetapi sudah berjalan pada track yang benar. Misalnya, kami bisa mengikuti kebijakan yang digariskan oleh otoritas memenuhi transaksi multilateral sebesar 5 % dari total transaksi bilateral," jelas wanita kelahiran Jakarta, bulan Desember 1955, itu.

Kewajiban itu bisa kami penuhi, karena kenyataannya investor kami sebagian besar bertransaksi untuk kontrak berjangka emas. Pada hal diawal TAF beroperasi, kami bayangkan investor akan transaksi indeks dan forex, tetapi ternyata dalam perjalanannya, investor lebih tertarik untuk transaksi emas, jelas wanita berdarah Minang ini.

Sebagai petinggi di TAF, istri dari Hermanto (57) ini, merasa tidak memiliki keterbatasan baik dalam urusan rumah tangga maupun aktivitas lainnya. "Dalam membagi waktu antara kantor dan rumah, saya tidak kewalahan. Karena kebetulan anak saya hanya ada satu, dan saat ini pun dia sudah mandiri dan cukup dewasa. Dia pun memiliki kesibukan sendiri sehingga saya tidak terlalu repot untuk urusan rumah tangga."

"Saya tidak pernah membawa pekerjaan dari kantor ke rumah. Karena kebetulan juga bidang yang saya tangani di kantor bersifat strategis. Jadi yang dibutuhkan hanya pemikiran dan konsep," jelas ibu dari satu anak ini.

"Suami saya pun memiliki kesibukan tersendiri. Dahulu dia berprofesi sebagai

arsitektur, tetapi sekarang mengelola sebuah resort 'Wisma Demaga' di Kepulauan Seribu. Jadi, kami bertiga masing-masing memiliki kesibukan."

Selain memiliki kesibukan di TAF, sejak tahun 1998 Wienda sudah bergabung disalah satu partai politik. Di partai itu dia pun memiliki posisi yang juga cukup penting, karena berada di Badan Pemberdayaan Perempuan Dewan Pimpinan Pusat. Di organisasi itu dia menempati Kepala Departemen Sumber Daya Ekonomi.

"Tujuan saya memasuki partai itu bukan untuk meraih kedudukan legislatif. Melainkan memperluas tali silaturahmi dengan sesama kader partai. Dan, saya tidak pernah membawa-bawa kader partai masuk bisnis ini, itu prinsip saya. Kalau pun mungkin ada kader partai kami yang menekuni bisnis ini, lebih disebabkan urusan bisnis kader tersebut," tegas Wienda.

Bicara soal pendidikan, paling lucu lagi, seloroh Wienda. Pendidikan lanjutan saya, atas saran orang tua, dari Sekolah Asisten Apoteker, Angkatan Darat. Setelah tamat dari sekolah itu tahun 1975, saya langsung ikatan dinas dan menjadi PNS, dan saya ditempatkan di RS Gatot Subroto. Ada sekitar delapan tahun saya terdaftar sebagai PNS di rumah sakit itu dengan golongan terakhir 2 C.

"Selama saya bekerja, saya tidak mendapatkan kepuasan dari sisi finansial. Karena gajinya cukup kecil. Tetapi saya bertekad kerja sambil kuliah di Fakultas Tekstil, Univ. Veteran Nasional, dan selesai pada tahun 1981."

"Bermodalkan pengetahuan di bidang tekstil itu, saya membuka usaha kecil-kecilan disain interior. Usaha itu cukup sukses. Salah satu klien dari usaha itulah yang memperkenalkan saya pada bisnis perdagangan berjangka ini," tandas Wienda Hendrawati. ▲